



ISLAM

Fasilitas Mewah di Lapas Bukan Hanya Masalah Perizinan

Oleh Ria Nurvika · 27 Okt, 15.00 WIB



Ilustrasi realistik fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Bogor, yang menyoroti persoalan pengawasan, perizinan aset negara, dugaan transaksi ilegal, dan sistem sanksi bagi narapidana. FOTO/AI for HAI.

Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

MBUSMAN RI menemukan bangunan dengan fasilitas mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas II A Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9).

Syafrida Rachmawati Rasahan menyampaikan bahwa rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti televisi

berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran.

Lebih fantastis lagi di dalam ruangan tersebut ditemukan minuman keras.

Fasilitas mewah ini dapat ditempati oleh warga binaan dengan mengeluarkan sejumlah uang.

Lebih jauh lagi ditemukan kawasan rumah mewah tersebut tidak memiliki pagar permanen.

Kawasan tersebut ternyata terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumput bambu di sekitarnya. Ini menjadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimip) atas desakan dari Komisi XIII DPR RI, dengan tujuan menjamin perlakuan yang sama (tidak diskriminasi) bagi seluruh warga binaan

telah membongkar tiga rumah hunian di kompleks Lapas Kelas IIA, Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor pada Rabu, 30 September 2026 lalu.

Pembongkaran tersebut dilakukan dengan menggunakan ekskavator besar.

Penemuan hunian dan fasilitas mewah di Lapas Cibinong mendapat sorotan dari beberapa pakar ...

Selengkapnya di halaman 18 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Titik Nol Kreativitas USK: Di Bawah Rindang Pohon Panggung Tanpa Nama, Antara Jejak Ulama dan Asa Mahasiswa



Tanyakan kepada siapa saja di Universitas Syiah Kuala (USK) tentang tempat nongkrong atau lokasi latihan paling legendaris, dan jawabannya sering kali keluar begitu saja tanpa perlu pikir panjang.

jang: "Belakang AAC aja." Tidak ada pin peta digital yang diperlukan. Tidak ada instruksi rumit yang harus dijelaskan.

Selengkapnya di halaman 16 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bahaya Jika Kasus Ijazah Gibran Mandek, Eks Direktur E BAIS: Bisa Munculkan Konflik Horizontal



BANDA ACEH - Eks Direktur E BAIS Brigjen TNI (Purn) Poernomo menyatakan Kaukus Dawlat Rakyat telah mengirimkan surat kepada Presiden, DPR, MPR, dan sejumlah pejabat negara setelah menggelar pertemuan di Bandung.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	16
Aneka Berita	18

NASIONAL

MAKI Sebut Nusron Wahid Dipanggil KPK Besok: Kalau Mangkir Lagi Harus Dijemput Paksa



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/10/2026) besok. Koordinator

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK bertindak tegas jika Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Bank Aceh

AcTion

Selamat dan Sukses
ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.
Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

NASIONAL

MAKI Sebut Nusron Wahid Dipanggil KPK Besok: Kalau Mangkir Lagi Harus Dijemput Paksa

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.23 WIB



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/10/2026) besok. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK bertindak tegas jika Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Informasi pemanggilan tersebut disampaikan Boyamin berdasarkan keterangan dari dua sumber yang dinilainya tepercaya. Dia menyebut Nusron telah menerima surat panggilan kedua untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK.

"Berdasarkan informasi yang saya terima dari dua pihak yang kepercayaannya saya anggap tinggi, diperoleh informasi bahwa Nusron Wahid telah dikirim surat

panggilan untuk hadir besok, tanggal 28 Oktober 2026, hari Rabu besok," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Menurut Boyamin, pemanggilan kali ini merupakan panggilan kedua. Dia menjelaskan, dua jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak dihadiri Nusron masih mengacu pada surat panggilan pertama.

Pada pemanggilan awal, Nusron disebut tidak hadir karena memiliki agenda di kementerian yang dipimpinnya. Sementara itu, pada jadwal pemeriksaan ulang, dia diketahui berada di Johor Bahru, Malaysia.

Boyamin meminta KPK mengambil tindakan tegas apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia bahkan mendesak lembaga antirasuah tersebut melakukan penjem-

putan paksa jika ketidakhadiran kembali terjadi.

"Maka kalau tidak hadir, ya harus dijemput paksa. Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi dan teguran," ujarnya.

Meski demikian, Boyamin berharap Nusron bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Dia menegaskan, kehadiran Nusron diperlukan untuk membantu memperjelas penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Boyamin juga mengingatkan bahwa Nusron dalam perkara tersebut masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.

"Jadi saya mengimbau kepada Bapak Nusron Wahid untuk hadir

aja lah, supaya mempercepat proses ini, terang benderang. Dan jika tidak cukup bukti, kan ya tidak jadi tersangka, gitu. Jadi percaya diri aja lah untuk datang," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Boyamin turut menyinggung informasi mengenai ketidakhadiran Nusron di kantornya sejak Senin (26/10/2026). Dia berharap kondisi tersebut menjadi pertanda baik bagi proses penegakan hukum, selama tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.

Boyamin menekankan pentingnya penyidikan yang transparan agar dugaan suap di lingkungan ATR/BPN dapat terungkap secara menyeluruh, termasuk kemungkinan aliran dana kepada ...

NASIONAL

Muslim Arbi: KDM Berkiblat ke Geng Solo, Prabowo Perlu Waspada Manuver Politiknya

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.17 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perlu dicermati arah politiknya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Di tengah popularitasnya sebagai kepala daerah, Muslim melihat kemungkinan Dedi membangun kekuatan Politik sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Muslim bahkan menilai KDM berpotensi berkiblat kepada kelompok politik yang diasosiasikan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muslim, dinamika tersebut perlu menjadi perhatian Gerindra dan Prabowo. Sebab, dukungan politik seseorang terhadap pemerintahan tidak otomatis menjamin kesetiaan jangka panjang ketika kepentingan dan kalkulasi menuju Pilpres 2029 mulai mengemuka.

"Prabowo perlu mewaspada manuver politik KDM. Jangan sampai dukungan yang terlihat sekarang justru menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan untuk kepentingan politiknya sendiri pada 2029," kata Muslim kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Muslim menyoroti pola komunikasi politik KDM ketika ditanya mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai presiden pada 2029.

Dedi, menurut Muslim, cenderung mengarahkan jawaban pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sikap tersebut dinilai menyerupai pola komunikasi politik Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pada masa itu, Jokowi kerap menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berfokus menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun, perjalanan politiknya kemudian bergerak ke tingkat nasional hingga menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.

Bagi Muslim, pola komunikasi semacam itu menarik dicermati karena pernyataan tidak memikirkan pencalonan presiden belum tentu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan seseorang membangun modal politik untuk masa depan.

Popularitas melalui pemberitaan, aktivitas di lapangan, komunikasi dengan masyarakat, serta kemampuan membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dapat menjadi modal penting dalam kompetisi politik nasional.

Muslim juga menilai KDM berpotensi menjajaki peluang politik bersama Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

Dalam pembacaannya, kemungkinan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun poros politik yang memiliki basis popularitas dan jaringan tersendiri. Dedi memiliki panggung politik di Jawa Barat, sedangkan Gibran menempati posisi strategis sebagai wakil presiden.

Jika kedua tokoh itu benar-benar membangun kerja sama politik, kombinasi tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru dalam persaingan menuju kursi kepresidenan.

Karena itu, yang lebih penting untuk dicermati saat ini bukan hanya siapa yang berpotensi berpasangan dengan siapa, melainkan bagaimana para ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Usul Harta Pejabat Tak Masuk LHKPN Dirampas Negara

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.10 WIB

BANDA ACEH - Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) diusulkan mengatur negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, pada Minggu 25 Oktober 2026.

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," kata Tanak.

Tanak juga mengusulkan agar negara merampas harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN.

"Pejabat wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ucapnya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan setiap penyelenggara tertib dan jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah.

"Memang lebih layak istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenkla-

tur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," katanya.

Menurut dia, salah satunya adalah Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

NASIONAL

Mahasiswa UI Bilang Mau Jadi Presiden saat Rapat DPR, Sahroni: Jangan Sampai Ijazahnya Palsu

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.26 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memotivasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) agar berani bermimpi besar dan terus mengasah kemampuan dalam kondisi apapun. Dia mengingatkan, ijazah bukan satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi dokumen pendidikan tersebut tidak boleh palsu.

Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ade Armando sebut Rocky Gerung Tak Punya Ijazah S1 yang Berakibat...

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.09 WIB

BANDA ACEH - Mantan dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, buka suara mengenai sosok anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung. Ade yang kini menjadi loyalis keluarga mantan

presiden Jokowi dan Wapres Gibran itu mengakui bahwa Rocky merupakan figur yang cerdas dan memiliki wawasan luas melebihi rata-rata pengajar akademis, meski terkendala ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Karhutla Masih Membara, Aktivis Desak Presiden Copot Raja Juli

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.37 WIB



BANDA ACEH -Aktivis muda nasional Muhammad Fithrat Irfan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, bahkan mencopotnya dari jabatan. Hal ini menyusul penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya belum memberikan perlindungan memadai kepada masyarakat.

Irfan juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pencegahan kebakaran, membuka perkembangan penegakan hukum, serta memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai kewajiban.

Desakan tersebut disampaikan di tengah penurunan jumlah titik panas, meskipun kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah. Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla sepanjang Januari

hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare.

“Saya mendesak Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik serta kelalaian atas penanganan karhutla yang saya nilai belum mampu memberikan perlindungan memadai,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Oktober 2026.

Irfan menegaskan, desakan itu merupakan kritik terhadap kinerja pejabat publik. Ia menyatakan tidak sedang menuduh Raja Juli secara pribadi melakukan pembakaran atau menyebutnya terbukti melakukan tindak pidana.

Menurutnya, evaluasi harus mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan penanganan, kepatuhan pengelola lahan, hingga pemulihan lingkungan.

Titik Panas Turun, Karhutla Masih Terjadi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 12 kejadian bencana pada 26 Oktober 2026. Sebanyak 10 kejadian di antaranya merupakan karhutla yang tersebar di Grobogan, Luwu Timur, Ciamis, Bangka Tengah, Wonogiri, Sukoharjo, Sidenreng Rappang, Kota Batu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Malang.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 147 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 25 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Jumlah tersebut turun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 317 titik.

Namun, penurunan titik panas tidak serta-merta menunjukkan kebakaran telah berakhir. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit

sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar.

Penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Tanjung Jabung Timur, Jambi, beberapa wilayah di Sumatera Selatan, serta Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Pada lahan gambut, bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan pembasahan dan penyisiran lanjutan.

“Keberanian petugas yang memadamkan api tidak boleh menjadi penutup kelemahan pencegahan. Jangan sampai kerja keras di garis depan menjadi alasan untuk menghindari evaluasi terhadap pengambil keputusan,” ujar Irfan.

NASIONAL

Bahaya Jika Kasus Ijazah Gibran Mandek, Eks Direktur E BAIS: Bisa Munculkan Konflik Horizontal

Oleh Redaksi · 27 Okt, 16.57 WIB



BANDA ACEH - Eks Direktur E BAIS Brigjen TNI (Purn) Poernomo menyatakan Kaukus Daulat Rakyat telah mengirimkan surat kepada Presiden, DPR, MPR, dan sejumlah pejabat negara setelah menggelar pertemuan di Bandung. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong tindak lanjut atas persoalan yang dinilai berkaitan dengan legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poernomo sendiri sebagai Koordinator Kaukus Daulat Rakyat.Menurut Poernomo, situasi Politik mulai menghangat. Ia menilai perdebatan mengenai ijazah dan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Setelah pertemuan di Bandung, Kaukus Daulat Rakyat sudah mengirim surat kepada Presiden, DPR, MPR, dan pejabat negara,” ujar Poernomo di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu DPR kembali bekerja setelah masa reses. Poernomo berharap lembaga legislatif tersebut membuka ruang dialog dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Bagi Poernomo, persoalan ini tidak semestinya dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang dapat dipahami publik. Menurut dia, perdebatan mengenai persyaratan pendidikan seorang pemimpin negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak dijawab melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang jelas.

Poernomo menyoroti munculnya berbagai pendapat yang menyatakan bahwa calon presiden tidak perlu memiliki ijazah ter-

tentu. Menurut dia, pernyataan semacam itu justru berpotensi membuat masyarakat semakin bingung apabila tidak disertai penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

“Banyak pendapat yang membingungkan rakyat, menyatakan capres tidak perlu ijazah. Kasihan rakyat menjadi bingung. Bagaimana rakyat bisa maju kalau persoalan ijazah pemimpinnya tidak jelas?” kata Poernomo.

Ia juga menyinggung munculnya wacana bahwa pihak-pihak yang mendukung Jokowi dan Gibran akan menunjukkan ijazah Gibran kepada publik. Poernomo mengaitkan dinamika tersebut dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Meski demikian, persoalan mengenai dokumen pendidikan harus diselesaikan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, ketentuan perundang-undangan, dan kewenangan lembaga terkait. Perdebatan politik di ruang publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran persyaratan pencalonan.

Poernomo menilai, persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden harus memperoleh kejelasan agar tidak terus menjadi sumber ketegangan politik.

Poernomo mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Kaukus Daulat Rakyat telah diterima oleh PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pertemuan dengan kedua partai tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi politik dan menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang sedang dipersoalkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Laporan Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald Disetop, Polisi Sebut Tak Ditemukan Pidana

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.14 WIB

BANDA ACEH - Kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, berujung pada penghentian dua laporan polisi. Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan atas kedua laporan tersebut telah disetop setelah penyidik melakukan gelar perkara. Namun, alasan penghentiannya berbeda, sementara salah satu pelapor masih meminta perkara itu diperiksa kembali.Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (26/10/2026). Menurutnnya, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya telah melalui serangkaian peme-

riksaan sebelum diputuskan untuk dihentikan.

Laporan pertama tercatat dengan nomor LP/B/227/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 9 Januari 2026, dengan pelapor berinisial Y. Perkara ini ditangani Subdit I Ditressiber Polda Metro Jaya.

Penyelidik menghentikan penanganan laporan tersebut pada 14 September 2026 setelah gelar perkara menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan.

“Terhadap laporan yang ditangani Subdit I, penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana

dalam perkara yang dilaporkan,” kata Budi.

Nasib serupa dialami laporan kedua yang diajukan pelapor berinisial RR pada 19 Januari 2026. Laporan bernomor LP/B/483/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA itu ditangani Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya.

Dalam perkara kedua, polisi telah meminta klarifikasi dari pelapor, sejumlah saksi, pihak terlapor, serta ahli dan instansi terkait.

Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyimpulkan bukti yang tersedia belum cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara pada 15 September 2026, disepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Selanjutnya, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan telah diterbitkan pada 28 September 2026,” jelas Budi.

Meski kedua penyelidikan telah dihentikan, persoalan belum sepenuhnya selesai. Kuasa hukum pelapor dalam perkara yang ditangani Subdit IV meminta polisi menggelar perkara khusus untuk meninjau kembali penanganan laporan tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Disebut Gak Punya Urat Malu, ‘Gibran Gak Bakal Mundur Kecuali Dimundurkan’

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.42 WIB

BANDA ACEH - Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti desakan 150 akademisi yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Bachrum, permintaan tersebut tidak akan dihiraukan oleh Gibran. Ia menilai Gibran

dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sangat mementingkan kekuasaan dan jabatan. Karena itu, Bachrum meyakini Gibran tidak akan mundur secara sukarela dan hanya bisa lengser apabila dimundurkan.

“Forum Guru Besar mendesak Gibran mundur. Tapi cemanalah Jokowi & Keluarganya mana punya malu, mereka adlah ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Puji Presiden Brasil Lulusan SD, Said Didu Sentil Jimly: Membela Dinasti Jokowi Kok Semangat Banget

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.34 WIB



BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang memuji terpilihnya kembali Luiz Inácio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil untuk masa jabatan keempat meski hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD). Menurut Said Didu, sebagai seorang ahli hukum, Jimly seharusnya memahami perbedaan aturan perundang-undangan di Indonesia dan Brasil terkait persyaratan pendidikan bagi calon presiden maupun calon wakil presiden.

"Pak @JimlyAs sebagai ahli hukum. Undang-Undang mereka mungkin memang mengizinkan, sementara UU kita mengharuskan

persyaratan ijazah," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (27/10).

Ia menilai pujian Jimly terhadap Lula mengandung pesan yang seolah membela dinasti Politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mengingat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang menjadi sorotan terkait polemik ijazah.

"Membela dinasti Jokowi kok semangat banget Pak. Biar lebih seru - mulai sekarang Bapak pimpin tim sukses Jan Ethes (cucu Jokowi) aja Pak," tegasnya.

Sebelumnya, Jimly memuji Lula karena kembali terpilih sebagai Presiden Brasil. Ia menyoroti latar belakang pendidikan Lula yang hanya menamatkan sekolah dasar dan mengikuti pendidikan kete-

rampilan, namun tetap mampu memenangkan pemilihan presiden pada Minggu (25/10/2026). Dalam kontestasi tersebut, Lula mengalahkan pesaingnya dari kubu sayap kanan, Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro.

"Hebat, Presiden Brasil Lula da Silva kmbali trpilih jadi Presiden ke4 kalinya. Pdhal cuma tamat SD & kursus ktrampilan," tulisnya di akun X pribadinya dikutip Senin (26/10).

Jimly kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan dalam Konstitusi Brasil yang mengatur syarat pencalonan peserta pemilu.

"Karena di Pasal 14 ayat (4) UUD Brazil, smua kandidat pemilu baik parlemen maupun pres/wapres hrs trdaftar sebagai

pemilih & tidak buta huruf," lanjutnya.

Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat diketahui mendesak Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada awal Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

NASIONAL

Kuasa Hukum Pastikan Semua Ijazah Gibran bakal Ditunjukkan di PTUN: SD, SMA hingga S1

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.11 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi menyatakan siap membuktikan kelengkapan ijazah Gibran dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Kamis (29/10/2026) mendatang.

Langkah ini menyusul keputusan majelis hakim yang menerima Gibran sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.

"Kami akan buktikan semuanya sekolah itu dengan ijazah-ijazah Mas Gibran. Semuanya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua lengkap. Ada semuanya. Kalau penyetaraan itu suket, ini ijazah, ada ini ijazahnya," kata Rullyandi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Pasal Selundupan di Kasus Ijazah?' di iNews, Selasa (27/10/2026).

"Semua lengkap dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, clear, saya nyatakan clear ya dan itu akan dibuktikan oleh PTUN," ujarnya.

Sebagai informasi, Mercy Sihombing mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmendiksus) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Gugatan tersebut berkaitan dengan penerbitan doku-

men penyetaraan pendidikan Gibran.

Objek yang dipersoalkan Mercy adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019 terkait pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dokumen tersebut menyatakan pendidikan yang ditempuh Gibran setara dengan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia.

"Sekali lagi saya katakan bahwa gugatan ini bukan gugatan Politik. Ini gugatan administrasi, yang kami persoalkan adalah satu dokumen negara, yaitu surat keterangan nomor 9149/D.DI/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah," kata Mercy.

Mercy menilai penerbitan surat penyetaraan yang ditandatangani atas nama Ditjen Dikdasmen oleh Sekretaris Ditjen Sutanto tersebut menerangkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia pada 2006 dan dinyatakan setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Menurutnya surat tersebut perlu diperiksa dari sisi administrasi, termasuk mengenai informasi yang tercantum dalam dokumen. Dia menegaskan gugatan ini menjadi dasar pengujian terhadap proses penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN

ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses
ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.
Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
 Markas Besar TNI Angkatan Darat,
 Jakarta Pusat,
 pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
 selalu mendapat rahmat dan petunjuk
 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
 Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
 Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

NASIONAL

Jimly Puji Presiden Brasil Cuma Tamat SD, Netizen Jawab Menohok: Dia Gak Punya Paman di MK

Oleh Redaksi · 26 Okt, 18.30 WIB

BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memuji keberhasilan Luiz Inácio Lula da Silva yang kembali terpilih sebagai Presiden Brasil untuk keempat kalinya pada Minggu (25/10/2026). Lula, yang berusia 81 tahun, memenangi putaran kedua dengan 51,79% suara mengalahkan Flávio Bolsonaro (48,21%), meski sebelumnya tertinggal di putaran pertama. Melalui akun X @JimlyAs, Jimly menulis bahwa pencapaian itu "hebat" karena Lula hanya tamat SD dan mengikuti kursus keterampilan. Ia merujuk Pasal 14 ayat (4) UUD Brasil yang mensyaratkan kandidat terdaftar sebagai pemilih dan tidak buta huruf, tanpa syarat pendidikan formal tinggi.

"Hebat, Presiden Brasil Lula da Silva kmbali trpilih jadi Presiden ke4 kalinya. Pdhal cuma tamat SD & kursus ktrampilan. Karena di Pasal 14 ayat (4) UUD Brazil, smua kandidat pemilu baik parlemen maupun pres/wapres hrs trdaftar sbg pemilih & tdk buta huruf", cuitnya.

Pujian ini memicu reaksi netizen yang membandingkan perjalanan Lula dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Banyak yang menyebut Lula "bukan anak karbitan" seperti Gibran, yang dinilai naik cepat berkat dinasti Politik dan dukungan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo. Istilah "anak karbitan" merujuk pada seseorang yang dipercepat naik tanpa proses alami, mirip buah yang dimatangkan dengan karbit.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Luhut Binsar Pandjaitan: Tak Benar RI-Singapura Berkelahi Gara-gara Pemangkasan Ekspor Gas

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.54 WIB



BANDA ACEH -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah Indonesia tengah berkonflik dengan Singapura menyusul kebijakan pemangkasan ekspor gas alam ke negara tetangga tersebut.

Luhut mengaku telah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai persoalan tersebut.

Menurutnya, persoalan ekspor gas tidak seharusnya membuat hubungan bilateral kedua negara memanas.

"Nggak juga (tidak menimbulkan konflik), saya kira karena Pak Bahlil juga tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan

ini aja concernnya. Sebenarnya, kita ngapain berkelahi sama Singapura kan enggak ada juga," kata Luhut kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Meski begitu, Indonesia, kata Luhut, harus tetap memiliki posisi yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

"Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus," kata Luhut.

Luhut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, pandangan Prabowo perlu didengar oleh negara-

negara ASEAN mengingat posisi Indonesia di kawasan.

"Saya kira Presiden sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN," kata Luhut.

Sebelumnya, Bahlil meminta pemerintah Singapura saling menghargai dalam menjalin hubungan bilateral. Ia menyindir sikap negara tetangga yang dinilai meminta penghormatan ketika membutuhkan, tetapi justru mengolok-olok Indonesia saat menghadapi kesulitan.

"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Tetapi saya juga

minta, jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai; susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain, gimana itu?" kata Bahlil dalam konferensi pers terkait ketahanan energi nasional, Senin 26 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 24 Oktober 2026.

Pemangkasan itu mencakup pasokan gas dari wilayah Natuna sebesar 15 MMSCFD dan Sumatra sebesar 16 MMSCFD.

NASIONAL

Luhut Tolak Ikut Campur Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.46 WIB



BANDA ACEH -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan evaluasi kebijakan ekspor gas alam Indonesia ke Singapura kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Luhut menilai, Bahlil telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan melakukan evaluasi sebagaimana diperlukan.

"Ya, kira-kira kita serahkan pada Menteri ESDM, kan Menteri ESDM tadi sudah memberikan pernyataan, kira-kira ya perlu dievaluasi baik-baik dan saya kira Pak Bahlil sudah melakukan itu semua," kata Luhut kepada wartawan, Selasa 27 Oktober 2026.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 24 Oktober 2026.

Pemangkasan tersebut mencakup pasokan gas dari wilayah Natuna sebesar 15 MMSCFD dan Sumatra sebesar 16 MMSCFD.

Bahlil menjelaskan, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura

sebelumnya mencapai 409,55 MMSCFD. Dengan pengurangan sebesar 31 MMSCFD, volume yang dipangkas setara sekitar 8 persen dari total ekspor.

"Saya ulangi, total ekspor kita gas pipa, dari dua tempat, satu adalah dari lautan Natuna, satu adalah dari Sumatra. Itu totalnya sebesar 409,55 MMSCFD. Yang kemarin kita potong, itu adalah 31 MMSCFD, hanya kurang lebih sekitar 8 persen," ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pengurangan volume ekspor tidak melanggar kontrak karena masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan.

Bahlil juga meminta pemerintah Singapura saling menghargai dalam menjalin hubungan bilateral. Ia menyindir sikap negara tetangga yang dinilai meminta penghormatan ketika membutuhkan, tetapi justru mengolok-olok Indonesia saat menghadapi kesulitan.

"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Tetapi saya juga minta, jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai; susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain, gimana itu?" kata Bahlil dalam konferensi pers terkait ketahanan energi nasional, Senin, 26 Oktober 2026

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Rugi BUMN Belum Tentu Korupsi, Pemerintah Sebut Harus Dilihat Niatnya!

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.08 WIB

BANDA ACEH - Perusahaan pelat merah merugi belum tentu berarti pengrusnya melakukan korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengingatkan perlunya membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan kerugian yang muncul dari tindakan yang sejak awal dilandasi niat jahat. Persoalan inilah yang kini ikut menjadi perhatian pemerintah di tengah polemik usulan perubahan ketentuan kerugian negara dalam perkara korupsi. Supratman mengatakan, keputusan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melalui perhitungan matang, mitigasi risiko, dan prinsip kehati-hatian tidak bisa begitu saja disamakan dengan tindakan yang sengaja dirancang untuk merugikan negara.

Menurutnya, proses pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting untuk melihat apakah kerugian perusahaan merupakan konsekuensi bisnis atau terdapat unsur kesengajaan melakukan pelanggaran hukum.

"Saya hanya memberi perspektif saya, bahwa memang harus dibedakan mana tindakan korporasi yang dalam aksi korporasinya itu sudah memperhitungkan segala hal dan prudent, itu tentu berbeda dengan mereka yang punya niat dari awal, karena itu bisa dilihat dari proses pengambilan keputusannya," kata Supratman di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman ketika menanggapi usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan

kembali ketentuan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan keputusan bisnis korporasi negara.

Supratman menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Sebab, kerugian dalam kegiatan usaha tidak selalu muncul akibat penyalahgunaan kewenangan. Ada pula risiko komersial yang tetap dapat terjadi meskipun pengurus perusahaan telah menjalankan prinsip kehati-hatian.

Sebaliknya, keputusan yang sejak awal diambil dengan niat melanggar hukum tentu memiliki persoalan berbeda. Unsur niat jahat atau mens rea menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembaruan aturan tidak mencampurkan risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang memang mengandung unsur tindak pidana.

Meski demikian, Supratman memastikan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai perubahan ketentuan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Usulan DEN, kata dia, masih berada pada tahap pembahasan awal. Bahkan, pemerintah belum sampai pada pembicaraan konkret mengenai revisi undang-undang.

"Itu kan baru usulan, belum ada sampai hari ini, itu masih didiskusikan. Karena kalau kita mau bicara yang pasti-pastikan berarti harus mengubah undang-undang," ujarnya.

NASIONAL

Geisz Khalifa Sindir Gibran: Sekatro-katronya Elu Waktu Sekolah, Pasti Ada yang Ingat!

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.06 WIB

BANDA ACEH - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Khalifa, melayangkan sindiran tajam terkait kontroversi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan usulan Hak Angket di DPR. Geisz menilai pertanyaan mengenai riwayat pendidikan tingkat menengah seharusnya menjadi hal yang sederhana dan mudah dibuktikan berskala nasional.

Geisz membandingkan pengalamannya saat ditanya mengenai latar belakang pendidikannya sendiri. Ia menegaskan bahwa seseorang yang benar-benar menempuh pendidikan pasti memiliki rekam jejak, dokumen, serta rekam seangkatan yang dapat mengonfirmasi keberadaannya.

"Gue kalau ditanya, 'SMA lu di mana?' Gue jawab: SMA Negeri 7 Jakarta. Kartu OSIS masih ada.

Foto zaman muda juga ada," ujar Geisz.

Ia juga menyinggung rekam jejak pendidikan Anies Baswedan sebagai contoh figur publik yang memiliki riwayat sekolah yang teratur dan dapat diverifikasi dengan mudah.

"Gue jadi ingat Anies Baswedan. Alumni SMA 2 Yogyakarta, pernah jadi Ketua OSIS se-Indonesia. Riwayat masa sekolahnya punya cerita yang bisa ditelusuri. Orang kalau punya riwayat yang jelas, ditanya sekolah di mana, ya tinggal jawab. Nggak perlu bikin satu republik ikut mikir," tegasnya.

Menurut Geisz, polemik ijazah ini telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tingkat lembaga negara. Ia menilai persoalan bukti kelulusan, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, merupakan hal mendasar yang memiliki standar verifikasi yang jelas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Menkes Minta Semua Rumah Sakit Harus Bisa Tangani Gangguan Jiwa, Tak Hanya RSJ

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.39 WIB



BANDA ACEH - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh rumah sakit di Indonesia mampu menangani pasien dengan gangguan kesehatan mental. Apa alasannya?

Menurut Menkes Budi, pelayanan kesehatan jiwa tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit jiwa (RSJ) karena kebutuhan masyarakat membutuhkan jangkauan layanan yang lebih luas.

Budi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sistem penanganan kesehatan mental secara berjenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah ini diperlukan agar masyarakat yang mengalami gangguan mental bisa mendapatkan penanganan sesuai kondisi dan tingkat keparahannya.

"Mulai dari seluruh puskesmas, kemudian naik ke rumah sakit,

terus ke atas. Kalau dulu hanya punya rumah sakit jiwa khusus, nanti kami akan bilang semua rumah sakit harus bisa menangani kesehatan mental. Karena kalau hanya rumah sakit jiwa enggak akan cukup," kata Budi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Rencana tersebut sejalan dengan hasil skrining kesehatan jiwa yang dilakukan pemerintah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada 2025, sekitar 70 juta penduduk telah menjalani skrining menggunakan kuesioner untuk memetakan kondisi kesehatan mental masyarakat.

Dari pemeriksaan tersebut, sekitar 7 juta orang terindikasi mengalami gangguan mental. Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa memiliki beragam jenis, mulai

dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder, depresi, hingga skizofrenia.

"Penyakit mental tuh ada jenis-jenisnya. Mulai yang paling rendah namanya anxiety disorder, cemas, itu termasuk masalah kesehatan mental. Naik sedikit namanya depression disorder, depresi. Ada yang namanya skizofrenia, ini yang benar-benar seperti sakit jiwa," ujarnya.

Skrining itu juga mengidentifikasi individu yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Budi menilai, temuan tersebut harus diikuti kesiapan fasilitas kesehatan karena setiap kondisi membutuhkan pendekatan dan perawatan yang berbeda.

"Tantangannya di kami, karena sudah ketemu kan, oh masalahnya sudah ketemu nih, yang mau

bunuh diri berapa, ini berapa, sudah ketemu. Kita harus mempersiapkan infrastrukturnya karena perawatannya beda kan," tuturnya.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan mental. Puskesmas diharapkan dapat menjadi bagian dari layanan awal, sedangkan rumah sakit menangani pasien yang membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut sesuai kebutuhan medis.

Dengan sistem berjenjang tersebut, penanganan kesehatan mental diharapkan tidak terpusat pada RSJ khusus. Seluruh fasilitas kesehatan yang terlibat perlu memiliki kemampuan dan dukungan yang sesuai agar pasien dapat ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.21 WIB

BANDA ACEH -Perjuangan Politik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak cukup hanya mengandalkan desakan publik kepada pimpinan DPR. Dukungan fraksi-fraksi partai politik di parlemen menjadi faktor penting untuk membuka jalan bagi proses konstitusional tersebut.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, DPR dijadwalkan kembali memasuki masa persidangan pada 9 November 2026 setelah masa reses. Menurutnya, momentum tersebut perlu diperhatikan oleh kelompok mantan Wamenkumham Denny Indrayana maupun kekuatan politik yang menginginkan pemakzulan Gibran.

Amir menilai pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan politik dari fraksi-fraksi partai. Karena itu, komunikasi dengan partai politik dan Fraksi di DPR dinilai lebih strategis dibandingkan hanya menyampaikan tuntutan kepada pimpinan parlemen.

"Sesuai realitas yang ada, kelompok yang menginginkan pemakzulan Gibran harus membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik," kata Amir, dikutip Senin 26 Oktober 2026.

Menurut Amir, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang sedang memperjuangkan pemakzulan Gibran. Ia menyebut komunikasi dengan kedua partai tersebut sudah dila-

kukan dan perlu ditindaklanjuti melalui langkah politik yang terukur.

"Kalau memang ingin memperjuangkan pemakzulan Gibran, temui fraksi PDIP dan PKS. Bangun komunikasi politik dengan mereka. Jangan hanya berharap pimpinan DPR mengambil keputusan tanpa dukungan dari kekuatan politik di parlemen," kata Amir.

Amir menekankan bahwa langkah tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi. Menurut dia, perjuangan pemakzulan tidak boleh berhenti pada tekanan politik, tetapi harus diarahkan pada prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Selain wacana pemakzulan, Amir menyoroti kemungkinan penggunaan Hak Angket DPR.

Hak tersebut merupakan instrumen pengawasan parlemen yang dapat digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas.

Ia menilai, apabila hak angket benar-benar bergulir dan memenuhi persyaratan, proses tersebut berpotensi membawa persoalan politik ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan pemanggilan Presiden Prabowo Subianto dalam proses penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau hak angket berjalan, Prabowo bisa dipanggil dewan. Ini yang harus diantisipasi Gerindra," kata Amir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pelaku Pembunuh Ibu & Anak di Madiun Bukan Orang Sembarangan, Polisi Sebut IQ-nya di Atas Rata-Rata

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.52 WIB



BANDA ACEH - Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Madiun berinisial DBM disebut memiliki tingkat intelegensi atau IQ di atas rata-rata. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan psikologis yang disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing, dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (27/10/2026). "Jadi memang yang bersangkutan ini kan, saya sampaikan tadi, sudah diperiksa psikologis, memang dia mempunyai kelebihan berupa IQ di atas rata-rata. Dia juga memiliki kepintaran yang tinggi," tuturnya.

Roy menjelaskan, tersangka membutuhkan waktu sekitar dua hari sejak dugaan pembunuhan dilakukan hingga menjalankan upaya untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak kedua korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban DH diduga tewas setelah dicekik tersangka di sebuah hotel di Kota Madiun. Sementara itu, anak korban berinisial AGF diduga dibunuh di dalam mobil dengan cara yang sama.

Polisi menyebut pembunuhan terhadap DH dilatarbelakangi perselisihan yang terjadi saat tersangka dan korban bertemu di

hotel. Keduanya diketahui merupakan pasangan suami istri siri yang menikah ketika tinggal di Kalimantan.

"Yang jelas, berdasarkan hasil penyelidikan kita bahwa motif yang dimunculkan pada waktu pemeriksaan yaitu karena adanya perselisihan yang terjadi sesaat pada saat tersangka dan korban bertemu di hotel," beber Roy.

Adapun pembunuhan terhadap AGF, menurut keterangan tersangka kepada penyidik, diduga dilakukan karena ia khawatir anak tersebut akan menjadi saksi atas pembunuhan DH. Roy menegaskan bahwa AGF merupakan anak kandung korban, bukan anak kandung tersangka.

"Dan mengapa sampai dia menghabisinya anaknya, berdsarkan pengakuan ari tersangka kepada kami, penyidik, ada kekhawatiran yang bersangkutan, si anak ini akan menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Makanya ikut juga dihabisinya".

Dalam penanganan perkara ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk mobil Pajero, sepeda motor, wadah berisi bahan bakar, dan telepon seluler. Polisi juga memeriksa alat penggilingan yang telah diserahkan ke laboratorium forensik.

LINGKUNGAN

Foto Cerita Banjir Aceh Karya Chaideer Mahyuddin Raih Silver Asian Media Awards 2026

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.38 WIB

SINGAPURA — Foto cerita karya fotografer Agence France-Presse (AFP), Chaideer Mahyuddin, tentang banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir 2025 meraih penghargaan Silver dalam kategori Best in Climate Photography pada Asian Media Awards 2026 di Singapura, Senin (26/10).

Karya tersebut mengangkat kisah para penyintas banjir bandang di Aceh. Cerita yang menyoroti dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat itu terpilih dalam seleksi editorial khusus tingkat Asia Pasifik.

Bencana banjir bandang yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra menjadi perhatian serius karena menimbulkan korban jiwa lebih dari seribu orang.

Peristiwa tersebut juga menyoroti dampak kerusakan lingkungan dan deforestasi terhadap risiko bencana ekologis.

Selain penghargaan yang diraih Chaideer, AFP juga meraih penghargaan Best Lifestyle Photo-

graphy dalam ajang media bergengsi tersebut.

Bagi Chaideer, penghargaan ini memiliki makna khusus karena menjadi pengakuan atas usahanya mendokumentasikan dampak bencana dan kerusakan lingkungan di Sumatra.

Sebelumnya, karya fotonya berjudul The Last Hope meraih juara pertama kategori Nature and Environment dalam Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2026 yang digelar di Bogor.

"Ini adalah pesan penting bagaimana kondisi hutan dan lingkungan di Aceh dan Sumatra sedang tidak baik-baik saja akibat tambang dan deforestasi yang semakin menggila," kata Chaideer.

Melalui karya jurnalistik visual tersebut, Chaideer berharap persoalan kerusakan hutan dan lingkungan di Sumatra mendapat perhatian lebih luas, sekaligus mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga ekosistem untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.[]

NASIONAL

Nusron Wahid Dikabarkan Dipanggil KPK 28 Oktober, MAKI Desak Jemput Paksa jika Mangkir

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak bertindak tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (28/10/2026).
KPK bahkan diminta mempertimbangkan upaya membawa paksa apabila Nusron kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Desakan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang mengaku memperoleh informasi dari dua sumber yang dinilainya memiliki tingkat kepercayaan tinggi bahwa surat panggilan kepada Nusron telah dikirimkan untuk pemeriksaan besok.
“Semoga Nusron Wahid hadir. Tapi kalau tidak hadir, KPK harus tegas, betul-betul menerbitkan

surat perintah membawa, atau istilah kerennya dijemput paksa,” ujar Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Selasa (27/10/2026).
Menurut Boyamin, pemanggilan untuk 28 Oktober bukan sekadar panggilan kedua dalam pengertian biasa.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat pemanggilan yang dijadwalkan ulang setelah Nusron disebut meminta penundaan karena memiliki agenda di kantor.
Namun, Boyamin mengklaim Nusron justru bepergian ke Johor Bahru, Malaysia, pada Kamis ketika pemeriksaan yang dijadwalkan ulang itu seharusnya berlangsung.
Setelah itu, menurut dia, KPK menerbitkan surat panggilan berikutnya untuk pemeriksaan pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Informasi mengenai pengiriman surat panggilan, alasan penundaan, dan perjalanan ke Malaysia tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada KPK maupun pihak Nusron.
KPK Diminta Tidak Berkompromi
Boyamin menegaskan, apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, KPK harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan Dewan Pengawas KPK agar menjalankan fungsi pengawasan apabila penanganan perkara dinilai tidak sesuai prosedur.
“Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberi-

kan sanksi dan teguran,” kata Boyamin.
Pernyataan tersebut merupakan desakan Boyamin.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik maupun dasar untuk membawa paksa tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku dan fakta penanganan perkara.
Boyamin juga menyatakan bahwa Nusron masih dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.
Karena itu, ia meminta Nusron memenuhi panggilan agar penyidik dapat menggali keterangan secara langsung dan membuat perkara dugaan suap di lingkungan ATR/BPN menjadi terang.
“Ini panggilan kepada Nusron Wahid masih saksi. Jadi saya menghimbau pada Bapak Nusron Wahid untuk hadir aja lah supaya mempercepat proses ini terang-benderang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tok! Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.03 WIB

BANDA ACEH — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menolak perlawanan atau eksepsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Hakim memerintahkan, jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Kajari Bandung itupun.
Putusan sela tersebut, dibacakan hakim ketua Ahmad Fijarsyah Joko Sutrisno bersama hakim anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati

di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Febrie Adriansyah.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Febrie Adriansyah," kata Hakim Ketua Ahmad Fijarsyah Joko Sutrisno saat membacakan putusan sela, di persidangan, Senin (26/10/2026).
Majelis juga menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir.

Penolakan eksepsi tersebut, membuat perkara Febrie berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dan menghadirkan pemeriksaan saksi-saksi.
Majelis hakim menilai, keberatan (eksepsi) mengenai tidak detailnya asal-usul harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana merupakan persoalan pembuktian, bukan alasan untuk menyatakan surat dakwaan tidak jelas atau batal demi hukum.
Salah satu harta kekayaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah emas seberat 74 kilogram dan sejumlah valuta asing. Majelis membedakan kejelasan uraian surat dakwaan dari pembuktian

mengenai kebenaran asal-usul harta tersebut.
Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan keterkaitan harta kekayaan itu dengan tindak pidana asal dalam pemeriksaan pokok perkara.
JPU sebelumnya, meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie bersama tim penasihat hukumnya. Jaksa menilai surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.
Sebaliknya, Febrie juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan, mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti kepada JPU, serta memerintahkan agar ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Connie: Gegara Rocky Gerung, Akademisi Mengkritik Pemerintah Dianggap cari Jabatan

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.19 WIB



Pangamat Politik dan juga Anggota Watimpres, Rocky Gerung saat berbicara dengan Seskab Teddy Wijaya. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Sebanyak 150 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah mengirim surat terbuka yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Surat bertajuk “Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional” tersebut diterbitkan pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pengamat militer dan akademisi Prof. Connie Rahakundini Bakrie, yang menjadi salah satu inisiator, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontribusi intelektual dan tanggung jawab moral akademisi.
Menurutnya, ilmu pengetahuan harus menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan, dan substansi dari kritik akademisi harus didengar oleh para pemangku kebijakan.
"Kebijakan itu kalau di negara maju, basisnya ilmu pengetahuan. Nah, tapi jangan hanya gara-gara Rocky Gerung, akademisi mengkritik bertujuan untuk cari jabatan," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam siniar Forum Keadilan, dikutip Selasa (27/10).
Ia menepis anggapan miring terhadap gerakan para akademisi tersebut yang hanya ingin melakukan

seruan moral dan intelektual tak direndahkan mencari jabatan.
Surat terbuka ini ditujukan langsung kepada Gibran, dengan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto serta mantan Presiden Joko Widodo. Connie turut mengunggah dokumen tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @connierahakundinibakrie.
Selain Connie, draf surat ini diinisiasi oleh 12 tokoh akademisi lain yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia, di antaranya Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, dan Prof. Fathul Wahid.
Isi surat tersebut menyoroti tiga persoalan utama: runtuhnya keteladanan dan etika bernegara, krisis legitimasi di mata generasi muda dan institusi pendidikan, serta beban Politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Para guru besar menilai polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran memicu keprihatinan mendalam terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Forum Guru Besar Indonesia menyerukan agar Gibran mengambil langkah kesatria dengan mengundurkan diri demi menjaga marwah lembaga kepresidenan dan keselamatan bangsa.

NASIONAL

Kubu Febrie Singgung Gugatan Ijazah Gibran di MK usai Sidang Putusan Sela, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.31 WIB

BANDA ACEH - Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menegaskan majelis hakim belum menolak maupun engabulkan perlawanan kliennya dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Patra, majelis hakim akan mempertimbangkan perlawanan tersebut bersama putusan akhir perkara.
Dengan demikian, kata dia, penilaian terhadap aspek formil dan materiil perlawanan belum diputus secara terpisah. Dia mengatakan situasi tersebut serupa dengan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), yang tidak mengeluarkan putusan sela dalam perkara tersebut.
"Ini seperti MK yang kemarin, diperiksa bisa saja, ternyata secara

formil cacat. Jadi sekali lagi kami mau sampaikan, dalam putusan sela pagi ini majelis hakim tidak menyatakan menolak perlawanan kami," kata Patra kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Dia menjelaskan, majelis hakim tetap akan menilai aspek formil dan materiil meskipun pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap pembuktian. Patra pun mengapresiasi sikap majelis hakim yang dinilainya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa perlawanan kami dan juga Pak Febrie selain dari pembuktian tetapi menyangkut juga formil dan materiil," lanjut Patra.
Patra menambahkan, tim kuasa hukum telah siap menghadapi tahap pembuktian. Pihaknya akan menyampaikan pembelaan secara terperinci untuk menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Viral! Terekam Injak Tembok Pusara Makam Pahlawan, Pejabat Golkar Sumut Disindir Netizen soal Etika

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.49 WIB



BANDA ACEH – Video Viktor Silaen, pejabat Golkar Sumut, terekam menginjak tembok pusara makam pahlawan saat ziarah. Aksinya viral dan disindir netizen. Video seorang pejabat Partai Golkar Sumatera Utara saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan mendadak viral di media sosial. Viktor Silaen, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, menjadi sorotan setelah terekam berdiri di atas tembok pusara makam pahlawan.

Aksinya langsung menuai beragam komentar, termasuk sindiran pedas dari netizen yang mempertanyakan etika dan sikap menghormati para pejuang bangsa. Peristiwa tersebut terjadi ketika kader Golkar menggelar ziarah untuk memperingati HUT ke-62 Partai Golkar di Medan, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang semestinya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan itu justru ramai diperbincangkan setelah rekaman videonya beredar luas. Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @kabarsumatera.id sejak Senin (26/10).

Dalam rekaman yang beredar, Viktor terlihat berada di atas bagian tembok pusara sambil menyingkiskan celananya. Pemandangan itu kemudian memancing perhatian pengguna media sosial karena dianggap berkaitan dengan kepantasan bersikap di area pemakaman. Berdasarkan informasi dalam unggahan tersebut, kegiatan ziarah diikuti sedikitnya 500 kader Golkar dan dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap. Sejumlah pengurus turut hadir, di antaranya Viktor Silaen, Bendahara Umum Mula Rotua Siregar, Rolel Harahap, serta Surhenta Sembiring. Alih-alih hanya menjadi agenda penghormatan kepada pahlawan, kegiatan tersebut justru memunculkan perdebatan di dunia maya. Kolom komentar dipenuhi tanggapan warganet yang menyoroti tindakan dalam video tersebut. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari akun @wisnuhuda2. Warganet tersebut melontarkan sindiran bernada humor yang kemudian menjadi bagian dari

perbincangan mengenai video viral itu. “Sama Tuhan aja gk takut, apalagi cuma pusara,” tulis akun tersebut. Komentar itu menggambarkan nada kritik sebagian pengguna media sosial terhadap tindakan yang terekam dalam video. Meski disampaikan dengan gaya bercanda, tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku di area makam menjadi perhatian publik. Sindiran lain datang dari akun @dadansuhendar1 yang menghubungkan penghormatan kepada pahlawan dengan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan tugasnya. “Cara menghormati pahlawan itu kerja dengan benar dan tidak korupsi,” tulisnya. Sementara itu, akun @edi.kusmayadi.3363 juga melontarkan kritik terhadap kehadiran para tokoh di makam pahlawan. “Kalau bisa bicara... para pahlawan itu pasti ga mau ada mereka disana,” tulisnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Oleh Redaksi · 26 Okt, 23.03 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (26/10/2026). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dari tiga provinsi yang terdampak bencana. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau perkembangan pemulihan pascabencana, mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dalam rapat itu, pemerintah kembali memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemulihan fasilitas dasar, jalan nasional, jembatan, dan rumah ibadah yang ditangani melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Melalui koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hak Angket Suket Gibran Diprediksi Mulus Masuk DPR Jika Partai Ini Gabung!

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.13 WIB



BANDA ACEH - Peluang bergulirnya Hak Angket DPR terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergantung pada dukungan lintas fraksi. Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai PDIP tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan dukungan partai lain, termasuk PKS. Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (27/10/2026), Djayadi menjelaskan bahwa DPR dapat menindaklanjuti polemik tersebut melalui hak angket atau hak menyatakan pendapat. Namun, kedua mekanisme itu memiliki persyaratan yang berbeda. Menurutnya, hak angket relatif lebih mudah diajukan karena membutuhkan sedikitnya 25 ang-

gota DPR dari lebih dari satu fraksi. Dengan demikian, dukungan dari fraksi lain menjadi syarat penting agar usulan tersebut dapat diproses. “Hak angket lebih mudah, saya kira. Lebih sedikit ringan persyaratannya, yaitu 25 anggota mengusulkan dan lebih dari satu fraksi,” kata Djayadi. Ia menegaskan, PDIP tidak dapat mengajukan hak angket sendiri. Setelah usulan memenuhi persyaratan awal, proses di DPR juga harus memenuhi ketentuan kehadiran dan persetujuan anggota dewan. “Nah, memang secara administratif, politik di DPR nggak bisa diproses ini hak hak angket, kalau hanya PDI sendiri. Karena kan syaratnya itu lebih dari satu fraksi, begitu,” tegasnya.

Karena itu, Djayadi menilai keterlibatan PKS dapat mengubah peluang politik usulan tersebut. “Jadi kalau misalnya PKS betul-betul bergabung maka proses ini bisa dilanjutkan,” lanjut dia. Meski demikian, bergulirnya hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan Gibran. Djayadi mengingatkan bahwa prosesnya masih panjang dan hasil akhirnya belum dapat dipastikan, sehingga DPR perlu menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang pro dan kontra terhadap polemik tersebut. “Bahwa nanti prosesnya berakhir di misalnya tidak dilanjutkan sampai ke proses ke MK lagi dan pemakzulan misalnya maka semua harus sepakat, kita akhiri,” imbuhnya.

ADVERTORIAL



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

KPK Kembali Janji Segera Panggil Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.20 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berjanji secepatnya memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk mendalami kemungkinan adanya alur perintah dan aliran uang kepada pihak lain. "Tentunya secepatnya, ya. Karena memang penyidik membutuhkan keterangan dari NW. Apalagi pihak-pihak yang ada di lingkungan NW ini beberapa ditetapkan

sebagai tersangka, baik orang kepercayaan maupun juga ada Dirjen, dan beberapa pihak yang juga ada di lingkaran NW ini sudah dilakukan pengeledahan," kata Budi kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Budi, pemeriksaan Nusron diperlukan untuk mengonfirmasi berbagai temuan penyidik selama proses penyidikan, sekaligus mendalami apakah perkara tersebut berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan atau masih dapat dikembangkan kepada pihak lain.

"Sehingga nanti overviewnya jelas ya, apa yang terjadi di lapangan, adanya dugaan praktik suap ataupun penerimaan lainnya, ini kemudian ujungnya ke siapa gitu ya. Apakah memang berhenti

kepada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian sebetulnya ada alur perintah dari pihak lainnya. Jika memang itu tentu butuh pendalaman. Dari siapa? Termasuk juga soal aliran uang," ujar Budi.

Budi juga menyoroti besarnya nilai uang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) perkara tersebut. Menurutnya, barang bukti yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap pengurusan lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, tetapi juga terdapat uang lain yang diduga berasal dari setoran rutin dan penerimaan internal di lingkungan ATR/BPN.

"Nah, uang itu mengalirnya ke siapa saja? Ujungnya ke mana? Sehingga tentu kemudian penyidik

butuh keterangan dari pimpinan di Kementerian ATR/BPN," pungkas Budi.

Sebelumnya, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi. Pada penjadwalan pertama, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Saat pemeriksaan dijadwalkan ulang, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan memiliki agenda di luar negeri.

KPK menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut akan ditelaah oleh penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menerbitkan surat panggilan kedua dengan surat perintah membawa.

NASIONAL

2 Anak Menhaj Mundur dari Tenaga Ahli, Kemenhaj Segera Cari Pengganti

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.25 WIB



BANDA ACEH - Dua anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Surat pengunduran diri keduanya telah diterima pada Senin (26/10/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pengangkatan dua anak Gus Irfan sebagai tenaga ahli menjadi sorotan publik.

"Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita ya itu yang disampaikan juga oleh publik, diputuskan, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri," ujar Dahnil kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, Dahnil memastikan Kemenhaj akan mencari tenaga ahli pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Barbarossa dan Gibran. Penunjukan tenaga ahli baru nantinya menjadi kewenangan Menhaj.

"Jadi kami akan isi tenaga ahli dengan orang lain. Nanti kita lihat dan itu tentu adalah kebijakan Pak Menteri," tuturnya.

Dahnil menjelaskan, pengangkatan kedua anak Gus Irfan sebagai tenaga ahli bermula dari kebutuhan tenaga pendukung operasional Kemenhaj pada awal pembentukan lembaga tersebut.

Menurutnya, saat itu Badan Penyelenggara Haji yang menjadi

cikal bakal Kemenhaj hanya memiliki dua pimpinan, yakni menteri dan wakil menteri. Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendukung untuk menjalankan operasional menjadi mendesak.

"Akhirnya salah duanya itu adalah anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal, karena saya juga enggak ada yang membantu waktu itu karena Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu kepala dan wakil kepala," ucap Dahnil.

Dia menambahkan, keputusan mundur diambil setelah muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pengangkatan keduanya sebagai tenaga ahli.

"Nah, tapi karena ada sebutlah ini keributan, ada pro-kontra terkait dengan ini, maka beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tenaga ahli. Bukan mengundurkan diri sebagai putranya Pak Menteri. Nanti akan salah nanti. Mengundurkan diri sebagai tenaga ahli Kementerian Haji dan Umrah. Tapi tetap sebagai putranya Pak Menteri Haji dan Umrah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gus Irfan buka suara soal pengangkatan anaknya sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, keterlibatan anaknya sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ketua DPRD Sultra Dipecat Dari Partai NasDem

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.00 WIB

BANDA ACEH - Keputusan DPP Partai NasDem memberhentikan La Ode Tariale dari keanggotaan partai kini berlanjut ke proses pergantian antarwaktu (PAW).

DPW NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Kantor DPRD Sultra, Senin (26/10/2026), untuk menyerahkan surat pemecatan sekaligus mendorong agar tahapan pergantian segera diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Juru Bicara DPW NasDem Sultra, Muttaqin Siddiq, mengatakan penyerahan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan DPP NasDem yang memberhentikan La Ode Tariale sebagai kader partai.

"Kami mendatangi Kantor DPRD Sultra untuk menyerahkan surat pemecatan saudara La Ode Tariale. Jadi, secara otomatis, semua hak dan kewenangan yang melekat pada Tariale berhenti karena dia sudah dipecat dari

keanggotaan partai," kata Muttaqin, Senin (26/10/2026)

Langkah tersebut menandai dimulainya tahapan administratif yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. NasDem meminta proses PAW tidak berlarut-larut, tetapi tetap berjalan melalui mekanisme yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Muttaqin menegaskan, proses PAW harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk penyampaian surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, terdapat batas waktu tujuh hari untuk meneruskan surat terkait proses PAW ke KPU. Setelah surat diterima, KPU memiliki waktu lima hari untuk memproses dokumen yang diperlukan sebelum mengembalikannya kepada DPRD.

"Kalau kami, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam

perundang-undangan. Ada jangka waktu tujuh hari yang diatur undang-undang untuk surat itu diteruskan ke KPU. Di KPU juga ada batas waktu lima hari," jelasnya.

Ketentuan waktu tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti NasDem agar tahapan administrasi berjalan sesuai jadwal. Namun, pelaksanaan PAW tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

DPW NasDem Sultra berharap seluruh tahapan administrasi segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Penyerahan surat pemecatan menjadi langkah awal dalam proses yang selanjutnya melibatkan DPRD dan KPU.

Meski demikian, pemberhentian dari keanggotaan partai dan proses pergantian jabatan di lembaga legislatif merupakan tahapan yang harus dibedakan.

ACEH

Selama 14 Hari, Polres Aceh Barat Gencarkan Operasi Patuh

Oleh Aceh Barat · 26 Okt, 18.05 WIB



Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh

MEULABOH- Polres Aceh Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026 di halaman Mapolres Aceh Barat, Senin (26/10/26). Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas di Aceh.

Apel dipimpin Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., yang menegaskan bahwa ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

659 Atlet Panahan Berkompetisi, Irwansyah Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba Lewat Olahraga

Oleh Redaksi · 26 Okt, 22.19 WIB

BANDA ACEH - Sebanyak 659 atlet panahan bersaing memperebutkan gelar juara dalam ajang Koetaradja Archery Championship IV/2026 Piala Wali Kota Banda Aceh.

Kompetisi yang berlangsung pada 22-25 Oktober 2026 itu mencapai babak final pada Minggu (25/10/2026), dengan menghasilkan para juara dari 14 kategori yang dipertandingkan.

Kejuaraan tersebut digelar di Lapangan Panahan Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menutup turnamen

pada Minggu sore sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang.

Dalam kesempatan itu, Irwansyah mengajak generasi muda untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif, salah satunya melalui olahraga panahan, serta menjauhi narkoba dan pergaulan negatif.

"Mari para anak muda kita jauhi narkoba, kita dekatkan diri dengan olahraga, misalnya dengan dunia panahan ini yang banyak memberi dampak positif," ujar Irwansyah.

Pada kesempatan tersebut, Irwansyah juga mengucapkan selamat kepada para atlet yang berhasil meraih juara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Edy Mulyadi : Bola Kasus Pendidikan Gibran Kini di DPR, Pansus dan Hak Angket Mulai Mengemuka

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.14 WIB



BANDA ACEH – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai DPR RI mulai membuka ruang pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah fraksi disebut mulai menjajaki pembentukan panitia khusus (pansus) maupun penggunaan Hak Angket.

Menurut Edy, perkembangan tersebut patut dicermati karena persoalan yang sebelumnya menjadi perdebatan di ruang sidang dan ruang publik kini mulai memasuki ranah parlemen.

“Bola Politik pun mulai menggelinding. Pertanyaannya, adakah yang cukup berani menendangnya ke arah gawang?” tulis Edy dalam opininya, Senin (26/10/2026).

Edy merujuk putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam perkara

Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara tersebut, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, menurut Edy, pertimbangan hukum MK mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap perlu mendapat perhatian. Ia menyoroti keterangan dalam pertimbangan putusan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan SMA atau sederajat.

Edy menegaskan bahwa putusan tersebut tidak serta-merta berarti MK memutuskan pemakzulan Gibran. Meski demikian, ia berpandangan, persoalan dokumen pendidikan dan proses penyetara-

annya perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.

Pansus dan hak angket masih sebatas peluang

Edy menyebut sejumlah perkembangan politik di DPR sebagai alasan untuk mencermati kemungkinan penyelidikan lebih lanjut. Ia menyoroti sikap PDIP yang membuka peluang pembentukan pansus atau penggunaan hak angket, komunikasi lintas fraksi yang disebut mulai berlangsung di PKS, serta usulan dari PKB untuk mengklarifikasi dokumen pendidikan, proses penyetaraan, dan prosedur verifikasi.

Komisi II DPR juga disebut akan mengkaji putusan MK tersebut secara komprehensif.

Namun, Edy mengingatkan bahwa pembicaraan tersebut belum dapat diartikan sebagai

kesepakatan resmi untuk menggunakan hak angket. Golkar, misalnya, menilai persoalan itu dapat dibahas melalui Komisi II tanpa harus membentuk pansus atau menggunakan hak angket. Sejumlah fraksi lainnya juga belum menunjukkan komitmen resmi untuk melangkah ke tahap penyelidikan.

“Artinya, jalan masih panjang. Tetapi, pintu belum tertutup,” tulisnya.

Ia kemudian menyoroti komposisi DPR periode 2024–2029 yang beranggotakan 580 orang. Dalam tulisannya, Edy menghitung bahwa jika PDIP dengan 110 kursi, PKS 53 kursi, PKB 68 kursi, NasDem 69 kursi, dan Demokrat 44 kursi benar-benar bersatu, total dukungannya mencapai 344 ...

NASIONAL

KPK Masih Pertimbangkan Panggil Ulang Nusron Wahid, Boyamin: Jika Mangkir Jemput Paksa!

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.19 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Hal ini disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo merespons pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut bahwa KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron Wahid, pada Rabu (28/10) besok.

“Saat ini untuk pemanggilan terhadap Saudara NW, semuanya masih dipertimbangkan oleh penyidik,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (27/10).

Budi memastikan pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut jika penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. “Nanti jika sudah ada pemanggilan, pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman,” tegasnya.

Desakan agar KPK memanggil Nusron Wahid datang dari Koor-

dinator MAKI Boyamin Saiman. Pasalnya, ia menyebut bahwa KPK akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid, pada pekan ini. “Nusron Wahid dipanggil KPK besok Rabu 28 Oktober 2026,” ucap Boyamin.

Nusron sendiri telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah, pada Rabu (7/10) dan Kamis (15/10). Dalam dua panggilan tersebut, Nusron tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.

Karena itu, Boyamin menegaskan jika lembaga antirasuah kembali memanggil Nusron dan mangkir lagi, ia meminta KPK untuk melakukan jemput paksa terhadap politikus Partai Golkar tersebut.

Langkah jemput paksa itu dinilai penting dilakukan untuk memberikan keterangan secara jelas terkait kasus dugaan suap penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Jika mangkir maka wajib diterbitkan surat perintah membawa (jemput paksa),” pungkasnya

NASIONAL

Dua Kali Nusron Wahid Mangkir, MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.55 WIB

BANDA ACEH - Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid sebanyak dua kali dalam panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut pengaduan etik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadakan seluruh pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena menilai lembaga antirasuah itu tidak tegas menyikapi ketidakhadiran saksi tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pengaduan secara daring pada Minggu (25/10/2026). Ia menilai KPK semestinya mengambil langkah lebih tegas, termasuk menerbitkan surat perintah membawa terhadap Nusron Wahid.

Bagi Boyamin, persoalan ini bukan semata-mata soal ketidakhadiran seorang saksi, melainkan juga menyangkut konsistensi penegakan hukum dan kewibawaan lembaga antirasuah dalam memastikan kepatuhan terhadap panggilan penyidik.

Laporan investigasi korupsi “Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” ujar Boyamin dikutip Senin (26/10/2026).

Boyamin menilai lambannya respons KPK terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketegasan lembaga tersebut. Menurutnya, penanganan terhadap saksi yang mangkir semestinya dilakukan secara profesional dan konsisten sesuai ketentuan hukum.

Boyamin menyebut persoalan ketidaktegasan KPK tidak hanya terjadi dalam pemeriksaan Nusron Wahid. Ia juga menyinggung belum berhasilnya KPK menghadirkan saksi lain, yakni Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam kasus proyek jalan di Sumatera Utara, serta Witjaksono dalam perkara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Cabang Tilawah Warnai Arena Utama MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.51 WIB

KOTA JANTHO - Rangkaian kegiatan cabang tilawah mewarnai pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar di arena utama Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Senin (26/10/2026).

Kegiatan hari ini meliputi perlombaan golongan anak-anak, pengambilan maqra’ golongan remaja, hingga penampilan golongan dewasa pada malam hari.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Besar, Rusdi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing golongan.

“Untuk agenda hari ini, peserta golongan anak-anak mengikuti perlombaan sejak pagi dan dilanjutkan kembali pada siang hingga sore hari. Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan pengambilan

maqra’ golongan remaja, sedangkan penampilan golongan dewasa dijadwalkan pada malam hari,” ujar Rusdi.

Musabaqah tilawah golongan anak-anak berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang dengan peserta bernomor TQ 116 hingga TQ 132. Perlombaan kemudian dilanjutkan pada siang hingga sore hari, termasuk setelah waktu Asar, dengan peserta bernomor TQ 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, dan 143.

Secara keseluruhan, golongan anak-anak diikuti sebanyak 25 peserta.

Setelah rangkaian perlombaan golongan anak-anak, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan maqra’ bagi 20 peserta tilawah golongan remaja.

Para peserta tersebut memiliki nomor TQ 201 hingga TQ 211 serta TQ 213 hingga TQ 221.

Sementara itu, pada malam hari, musabaqah tilawah golongan dewasa dijadwalkan diikuti tujuh peserta dengan nomor TQ 308 hingga TQ 314.

Rusdi berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan para peserta dapat mengikuti setiap tahapan perlombaan dengan baik serta menampilkan kemampuan terbaik mereka.

“Kami berharap seluruh rangkaian perlombaan berjalan lancar sesuai jadwal dan seluruh peserta dapat tampil maksimal,” harapnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan MTQ ke-35 Aceh Besar Tahun 2026 sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta dari berbagai golongan untuk menunjukkan kemampuan membaca Al-Qur’an sesuai kaidah dan ketentuan musabaqah.**

ACEH

Aceh Barat Percepat Program Cek Kesehatan Gratis

Oleh Aceh Barat · 26 Okt, 17.02 WIB



Sekda Aceh Barat, Dr. Ir. Kardi, ST, MT, MH, membuka Rakor Pencegahan dan

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) setelah pelaksanaannya baru menjangkau 25.356 orang atau 11,91 persen dari jumlah penduduk hingga 13 Oktober 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Program CKG yang dibuka Sekretaris Daerah Aceh Barat ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ditangkap di Jombang, Ini Tampang Suami Sadis Pembunuh Istri dan Anak di Madiun

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.03 WIB



BANDA ACEH - Dwi Bagus Martono, tersangka pembunuhan Dini Hardiyanti dan anaknya yang berusia 4 tahun di Kota Madiun, Jawa Timur, ditangkap polisi setelah sempat menghilang. Dia ditangkap di rumah temannya di Jombang pada Minggu (25/10/2026) dini hari.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, Dwi Bagus ditangkap pukul 02.00 WIB. Berdasarkan pengakuan awal, tersangka telah berada di wilayah Jombang selama kurang lebih 15 hari.

"Ditangkapnya di wilayah Jombang kota," ujar AKBP Arbaridi, Senin (26/10/2026).

Setelah ditangkap, Dwi Bagus dibawa ke Polda Jatim untuk men-

jalani pemeriksaan. Pantauan di lokasi, Dwi Bagus turun dari minibus Hiace dikawal ketat sejumlah personel Jatanras Ditreskrim Polda Jatim.

Dwi Bagus mengenakan kaus berwarna biru dan celana pendek dengan tangan diborgol. Saat dimintai tanggapan terhadap aksi kejinya, Dwi Bagus hanya terdiam dan menunduk sembari menuju ruang tahanan Polda Jatim.

Polisi kini mendalami keterangan tersangka dan mencocokkannya dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik juga berencana mendatangi sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan Dini dan anaknya di Kota Madiun.

Selain itu, polisi mendalami kemungkinan adanya pihak lain

yang membantu tersangka selama berada di Jombang. "Pengakuan sementara masih satu orang, nanti kita masih kembangkan kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya," ucap Arbaridi.

Berdasarkan keterangan sementara polisi, Dini diduga dibunuh setelah terlibat cecok dengan tersangka di sebuah hotel di Kota Madiun. Dini diduga dicekik hingga tewas di kamar hotel, sedangkan anaknya diduga dibunuh di dalam mobil.

Setelah itu, tersangka diduga membakar jasad kedua korban dan memasukkannya ke mesin pencacah untuk menghilangkan jejak. Polisi masih mencari barang bukti lain, termasuk potongan tulang korban yang diduga berada di sekitar lokasi terkait.

Kasus ini bermula dari laporan kehilangan Dini dan anaknya pada 20 September 2026. Dalam proses pencarian, Dwi Bagus bahkan sempat mendampingi keluarga korban yang berasal dari Bogor untuk melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota.

"Pelaku dan keluarga korban yang ada di Bogor datang ke Madiun melapor, mengantar ke Polres Madiun Kota melapor kehilangan," katanya.

Polisi kini masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa untuk mengungkap dugaan pembunuhan ibu dan anak tersebut secara menyeluruh, termasuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain

NASIONAL

Kesaktian Jokowi Diuji Jika Jadi Ketum PSI

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.41 WIB



BANDA ACEH -Kesaktian Politik Joko Widodo (Jokowi) bakal diuji jika benar-benar menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Posisi tersebut akan menjadi pembuktian apakah pengaruh politik Jokowi tetap kuat setelah tidak lagi menjabat Presiden RI dan bukan bagian dari PDI Perjuangan (PDIP).

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, dorongan internal PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua umum membuka arena pertarungan politik baru bagi mantan orang nomor satu di Indonesia itu. "Apakah Jokowi masih sakti mandraguna sekalipun sudah tidak lagi menjadi presiden?" tanya Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi di PSI akan menjadi tolok ukur untuk melihat seberapa besar daya pengaruh politiknya setelah meninggalkan kursi kepresidenan.

Adi menjelaskan, selama ini pendukung Jokowi masih meyakini dirinya memiliki kekuatan politik yang besar. Namun, pengaruh tersebut perlu dibuktikan melalui capaian nyata, terutama dalam mengantarkan PSI menembus parlemen.

"Ini semacam pembuktian secara politik. Apakah Jokowi masih sakti sekalipun tidak lagi menjadi bagian dari PDIP," ujarnya.

Adi menambahkan, tantangan itu tetap berlaku apabila Jokowi nantinya memilih posisi Ketua Dewan Pembina PSI, bukan ketua umum. Sebab, ukuran kekuatan politik tidak cukup dilihat dari jabatan yang diemban, tetapi juga kemampuan mendongkrak dukungan pemilih.

"Ini menjadi pertarungan politik bagi Jokowi jika menjadi ketua umum PSI atau menjadi ketua dewan pembina PSI, apakah akan lolos parlemen atau tidak," pungkasnya.

NASIONAL

Dony Oskaria Kumpulkan Petinggi BUMN, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.31 WIB



BANDA ACEH -Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Pertemuan ini membahas penguatan distribusi kebutuhan masyarakat melalui sinergi antar-BUMN.

Salah satu fokusnya adalah mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama dalam memastikan pasokan energi dan pangan tetap lancar.

"Visi presiden itu sentral distribusi untuk setiap barang bersubsidi lewat Kopdes. Artinya data itu akan ada di Kopdes," kata Dony di Wisma Danantara, dikutip Selasa, 27 Oktober 2026.

BP BUMN dan Danantara Indonesia mengarahkan kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan PIHC untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi melalui jaringan KDKMP di berbagai daerah.

Kedua BUMN tersebut diharapkan dapat memperkuat kelancaran pasokan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdistribusi melalui koperasi desa dan kelurahan.

BP BUMN dan Danantara Indonesia berkomitmen mendorong kolaborasi antar-BUMN agar program KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan.

Langkah ini juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta menggerakkan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

SPORT

Jadwal MotoGP Malaysia 2026: Marquez Bidik Pelampiasan, Veda Ega Incar Kebangkitan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 18.51 WIB

BANDA ACEH, SEPANG — Marc Marquez berpeluang kembali memburu kemenangan saat MotoGP Malaysia 2026 digelar di Sirkuit Sepang, 30 Oktober hingga 1 November. Pembalap yang berstatus juara bertahan itu datang dengan motivasi tinggi setelah gagal berlaga pada MotoGP Australia akibat cuaca buruk.

MotoGP Malaysia menjadi seri penting dalam fase akhir persaingan musim 2026. Hasil balapan di Sepang berpotensi memengaruhi perebutan gelar juara, sehingga setiap poin menjadi krusial bagi para pembalap.

Sebelumnya, seri Australia di Sirkuit Phillip Island terpaksa dibatalkan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan balapan berlangsung. Situasi tersebut membuat Marquez kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan peluang setelah menunjukkan

kepercayaan diri tinggi menjelang akhir pekan balap.

Kini, pembalap berjudul The Baby Alien itu mengalihkan perhatian ke Sepang. Marquez diperkirakan berusaha menjadikan seri Malaysia sebagai momentum untuk meraih hasil maksimal setelah kekecewaan di Australia.

Selain Marquez, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, juga akan kembali berjuang di kelas Moto3 bersama Honda Team Asia. Veda sebelumnya berhasil merebut pole position pada Moto3 Australia, tetapi gagal tampil dalam balapan karena cuaca buruk di Phillip Island.

Moto3 Malaysia pun menjadi kesempatan bagi Veda untuk kembali menunjukkan potensinya setelah pencapaian tersebut tak berujung pada kesempatan berlaga di Australia.

Rangkaian MotoGP Malaysia dimulai pada Jumat (30/10/2026) dengan sesi latihan bebas dan latihan utama. Kualifikasi serta sprint race MotoGP akan berlangsung pada Sabtu (31/10/2026), sebelum balapan utama digelar pada Minggu (1/11/2026).

Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia 2026 dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

- Jumat, 30 Oktober 2026
- 08.00–08.35 WIB: FP1 Moto3
 - 08.50–09.30 WIB: FP1 Moto2
 - 09.45–10.30 WIB: FP1 MotoGP
 - 12.15–12.50 WIB: Practice Moto3
 - 13.05–13.45 WIB: Practice Moto2
 - 14.00–15.00 WIB: Practice MotoGP
- Sabtu, 31 Oktober 2026
- 07.40–08.10 WIB: FP2 Moto3
 - 08.25–08.55 WIB: FP2 Moto2
 - 09.10–09.40 WIB: FP2 MotoGP

- 09.50–10.05 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP
 - 10.15–10.30 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP
 - 11.45–12.00 WIB: Kualifikasi 1 Moto3
 - 12.10–12.25 WIB: Kualifikasi 2 Moto3
 - 12.40–12.55 WIB: Kualifikasi 1 Moto2
 - 13.05–13.20 WIB: Kualifikasi 2 Moto2
 - 14.00 WIB: Sprint race MotoGP Malaysia (10 lap)
- Minggu, 1 November 2026
- 09.40–09.50 WIB: Warm up
 - 10.00–10.40 WIB: Parade pembalap
 - 11.00 WIB: Balapan Moto3
 - 12.15 WIB: Balapan Moto2
 - 14.00 WIB: Balapan utama MotoGP Malaysia (20 lap)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Kiai NU Usulkan Abolisi untuk Gus Yaqut, KPK Pilih Fokus ke Pembuktian

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.19 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah fokus pada pembuktian dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Pernyataan itu disampaikan usai munculnya usulan dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama (NU) agar Yaqut mendapatkan abolisi.

Usulan abolisi untuk Yaqut datang dari para kiai NU saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Rabu (21/10).

Dalam pertemuan itu, hadir juga kakak kandung dari Yaqut yang Ern Lee, mengunggah pernyataan resmi KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang

sedang berjalan dalam perkara Yaqut dkk.

Ia menegaskan, saat ini perhatian publik sebaiknya diarahkan pada proses pembuktian perkara di persidangan.

Menurut Budi, keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan kuota haji tambahan.

“Yang pertama, KPK tentu mengajak dan mengimbau untuk kita fokus dulu kepada proses pembuktian yang sedang berjalan di persidangan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/10).

Budi menjelaskan, persidangan kuota haji tambahan masih berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan menghadirkan sejumlah

saksi yang dimintai keterangan oleh majelis hakim.

Kesaksian tersebut diperlukan untuk membantu menguraikan rangkaian peristiwa serta menjelaskan konstruksi perkara secara utuh.

“Proses pembuktian masih berlangsung, beberapa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan guna membantu menerangkan kepada majelis hakim bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini,” ujarnya.

Dalam persidangan, sejumlah saksi dari lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) telah memaparkan proses pengambilan keputusan terkait pembagian kuota haji tambahan.

KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pembagian kuota haji karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

Budi mengatakan, berdasarkan ketentuan, seharusnya kuota haji tambahan dibagi dengan komposisi 92 persen untuk jamaah haji reguler dan 8 persen untuk jamaah haji khusus.

Namun, pembagian yang dilakukan justru menggunakan perbandingan 50 persen untuk masing-masing kategori.

Selain memeriksa saksi dari Kemenag, persidangan juga menghadirkan pihak-pihak yang mengetahui proses awal pemberian kuota haji tambahan.

Keterangan mereka diperlukan untuk menelusuri tujuan penambahan kuota, yang sejak awal dimaksudkan untuk mengurangi panjangnya antrean keberangkatan jamaah haji reguler.

NASIONAL

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Oleh Redaksi · 27 Okt, 08.50 WIB



BANDA ACEH -Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengapresiasi langkah Pemerintah mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dan mengalihkan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan kepentingan pembangunan strategis nasional. Dalam panjang kebijakan ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan industri yang membutuhkan pasokan gas secara stabil.

Selama ini, kata Mulyanto, sejumlah sektor industri nasional mengeluhkan keterbatasan pasokan maupun tingginya harga gas. Industri pupuk, keramik, petrokimia, hingga pembangkit listrik sangat bergantung pada ketersediaan gas yang cukup, berkelanjutan, dan harga terjangkau. Gangguan pasokan gas bukan hanya menghambat kegiatan produksi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing industri nasional.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat mengeksport gas, sementara industri sendiri kesulitan mendapatkan pasokan. Kita memperoleh devisa dari ekspor, tetapi kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan energi nasional,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi

di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 tersebut tidak memungkiri keterkaitannya dengan aspek diplomatik dalam kebijakan tersebut, di tengah gencarnya kritik Singapura terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Menurutnya, hubungan antarnegara tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika kepentingan ekonomi dan Politik. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan energi nasional tidak dipersepsikan semata-mata sebagai respons terhadap kritik negara tetangga.

“Kita tentu memahami adanya isyarat diplomatik dalam dinamika ini. Tetapi kebijakan gas harus tetap berpijak pada kepentingan pembangunan nasional, bukan sekadar reaksi sesaat. Persoalan karhutla pun tetap harus kita tangani secara sungguh-sungguh,” ujarnya.

“Prinsipnya sederhana. Sumber daya alam kita harus lebih dahulu bekerja untuk kemakmuran rakyat sendiri. Ekspor tetap penting, tetapi bukan tujuan utama. Gas seharusnya menjadi penggerak industrialisasi, bukan sekadar sumber devisa. Inilah makna kedaulatan energi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Mulyanto.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Panas! Ekspor Gas Dipangkas, Singapura Ancam ‘Potong’ Kabel Internet Indonesia

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.23 WIB

BANDA ACEH - Ketegangan antara Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan setelah politik Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengunggah pernyataan bernada sindiran mengenai ketergantungan jaringan internet Indonesia terhadap negara tetangganya tersebut. Pernyataan Calvin muncul di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura.

Meski tidak secara terbuka menyatakan akan melakukan tindakan tertentu, unggahan mantan anggota parlemen Singapura itu memancing perhatian warganet Indonesia karena menyiratkan kemungkinan pemutusan kabel internet.

Melalui akun X @calvinelcheng, Calvin mengunggah infografis

yang diklaim menggambarkan ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura. Ia kemudian menuliskan komentar singkat yang langsung menarik perhatian publik.

“Potong?” tulis Calvin melalui akun X miliknya, seperti dikutip Disway.id, Senin (26/10/2026).

Unggahan tersebut memunculkan beragam reaksi karena infrastruktur kabel bawah laut dan jaringan internasional merupakan bagian penting dari konektivitas internet Indonesia dengan dunia.

Namun, pernyataan Calvin tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengumuman atau keputusan resmi Singapura untuk memutus jaringan internet Indonesia.

Sampai informasi dalam bahan pemberitaan ini disampaikan, tidak terdapat keterangan bahwa

pemerintah Singapura telah mengambil kebijakan semacam itu.

Dalam infografis yang diunggah, terdapat klaim bahwa sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.

Angka tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai besarnya peran Singapura sebagai salah satu pusat konektivitas digital regional.

Meski begitu, angka dalam infografis tersebut perlu diperiksa melalui sumber data independen. Lalu lintas internet internasional tidak selalu melewati satu negara atau satu jalur saja karena konektivitas dapat melibatkan berbagai kabel bawah laut, pusat data, penyedia jaringan, dan jalur penghubung lainnya.

Setelah unggahannya menuai respons, Calvin kembali memberikan penjelasan dengan nada yang disebut sebagai sindiran. Ia menegaskan bahwa Singapura merupakan negara yang beradab dan menaati hukum.

“Kami adalah orang-orang yang beradab dan taat hukum. Jelas kami tidak akan melakukan ini (memutus jaringan internet Indonesia),” kata Calvin dalam unggahan terbarunya.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian ratusan warganet Indonesia. Sebagian menghubungkan komentar Calvin dengan kebijakan energi Indonesia yang sedang menjadi pembahasan, khususnya pengurangan ekspor gas ke Singapura.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Hadiri Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG, Pj Sekda Aceh Tekankan Pembangunan Responsif Gender

Oleh Redaksi · 26 Okt, 16.04 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pejabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menghadiri Acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/10).

Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa verifikasi lapangan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kebijakan pembangunan agar semakin responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.

“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pembangunan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan mempe-

roleh manfaat pembangunan,” ujarnya.

Sekda menyebutkan, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ia juga menekankan agar seluruh SKPA dapat berperan aktif dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.

Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada 2025 mencapai 93,11, naik 0,47 poin dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 92,69.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Ternyata Ini Motif Dwi Bagus, Bunuh, Bakar, Giling Istri Siri dan Anaknya di Madiun, Akhirnya Terungkap

A man wearing an orange t-shirt with the text "TAHMA" and "DITAMATI POL" is being escorted by police officers. One officer in a white shirt is on the left, and another in a grey uniform is on the right. A banner in the background reads "POLISI Bersama Masyarakat".

Mahfud MD Soal 2 Tahun Prabowo: Ide Bagus tapi Eksekusi Hancur, Korupsi Menggila dan Hukum Diakali

A man with glasses and a light-colored jacket is speaking, gesturing with his right hand. In the background, there is a sign that reads "TERUS TERUS" with a microphone icon above it.

"Kalau sebagai kepala negara idenya bagus-bagus, visinya Pak Prabowo. Lalu kemudian sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi," ujarnya.



Bank Aceh



Action

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

15/10/2026

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Letda Jihad Ahmad Tewas Diduga Tertembak, Kopassus: Murni Kelalaian di Gudang Senjata

Oleh Redaksi · 27 Okt, 08.54 WIB



BANDA ACEH - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menyebut insiden yang menewaskan Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid di gudang senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, terjadi akibat kelalaian dan ketidaksengajaan. Kasus ini akan dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) Surakarta untuk proses penyidikan.

Kepala Penerangan Kopassus Kolonel Indra Mardianto membenarkan Jihad Ahmad meninggal dunia di Gudang Senjata Pal (Peralatan) Grup 2 Kopassus, Sabtu (24/10/2026). Dia menyebut, insiden tersebut terjadi saat sebuah pistol meledak.

"Itu kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak. Murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan,"

ucap Indra saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).

Indra menambahkan, kejadian yang menewaskan Letda Jihad Ahmad terekam kamera CCTV. Dia juga membantah narasi di media sosial yang menyebut insiden tersebut sebagai penembakan.

"Sehingga bisa terang benderang, nanti proses hukumnya. Dan kasusnya akan dilimpahkan ke Denpom untuk proses penyidikan," tuturnya.

Meski demikian, Indra belum membeberkan kronologi lengkap kejadian karena masih dalam proses penyelidikan yang ditangani Denpom Surakarta.

"Sehingga nanti akan diperjelas oleh penyidik Pom kelanjutan kasusnya. Rencana dari Ansum besok diserahkan kepada Denpom Surakarta," kata Indra.

Sebelumnya, Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid. Putra terbaik asal Raja Ampat, Papua Barat Daya meninggal dunia diduga ditembak rekan sejawatnya saat bertugas di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Jenazah almarhum telah dimakamkan secara militer di Taman Makam Bahagia Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (25/10/2026). Kedatangan jenazah dikawal langsung oleh Dangrup 2 Kopassus, Brigjen TNI Edwin Apria Candra.

Almarhum merupakan putra kedua dari Kapenrem 181/PVT Sorong, Mayor Inf Triyana dan Sekretaris Dinas PM-PTSP Kota Sorong, Zainab Jelfoom.

Keluarga Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid mendesak Mabes TNI dan Kopassus mengu-

sut tuntas kematian perwira muda tersebut yang diduga tertembak saat bertugas di Solo, Jawa Tengah.

Keluarga meminta transparansi mengenai kronologi kejadian, status hukum terduga pelaku, dan proses penanganan perkara melalui peradilan militer.

Perwakilan keluarga, Lantoga Sapua, mengatakan keluarga masih membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai insiden yang merenggut nyawa Jihad. Sejauh ini, keluarga baru menerima informasi awal bahwa terduga pelaku telah ditangani secara internal oleh kesatuan.

Namun, keluarga belum memperoleh penjelasan terperinci mengenai kronologi kejadian maupun status hukum terduga pelaku.

NASIONAL

Dorong Pemakzulan Gibran, Ahmad Khozinudin Cs Bakal Sambangi Kantor Yusril

Oleh Redaksi · 27 Okt, 08.46 WIB



BANDA ACEH -Kuasa hukum Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin terus mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHP.PNS/XIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hari ini, Selasa 27 Oktober 2026, Ormas Pejabat dan Aliansi Rakyat Menggugat/ARM, didampingi Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, akan mendatangi Kantor Menko Hukum, HAM dan Imipas Prof Yusril Ihza Mahendra.

"Proses pemakzulan sebagai tindak lanjut/konsekuensi hukum putusan MK dimulai dari DPR. Namun, bukan berarti eksekutif /pemerintah bisa berdiam diri," kata Khozinudin dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah wajib menyiapkan skenario peralihan kekuasaan Wapres baik karena dimakzulkan atau mengambil ini-

siatif berhenti (mundur) sesuai mekanisme konstitusi.

"Apalagi, saat jabatan Wapres kosong maka Presiden wajib mengirimkan 2 nama wapres pengganti kepada MPR, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wapres," jelasnya.

Khozinudin menilai Prof Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM & Imipas sekaligus ahli hukum tata negara wajib memberikan kajian hukum dan rekomendasi kepada Presiden.

"Prof Yusril tak bisa berdalih akan terjadi kekacauan hukum, atau beralih bawahan Presiden dan Wapres Gibran, sehingga mengambil posisi pasif dalam perkara ini," tegasnya.

"Apalagi, tanggung jawab sejarah bangsa, juga ada di pundak Prof Yusril. Pada era Soeharto, Prof Yusril memiliki peran penting dan krusial dalam menyiapkan mekanisme ketatanegaraan untuk dijadikan sandaran legitimasi hukum pernyataan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia," pungkas Khozinudin.

ACEH

Pj Sekda Aceh Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Antisipasi Puncak Musim Hujan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 15.34 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, memimpin apel kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana dan gelar peralatan di halaman gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Apel tersebut diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta personel dari Basarnas, Dinas Perhubungan Aceh, PMI, Tagana, BPBA, Dinas Sosial, BMKG, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.

Dalam arahnya, Taufik meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana

hidrometeorologi, terutama menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, intensitas hujan diperkirakan meningkat pada 10 Zona Musim (ZOM) atau 62,5 persen wilayah ZOM di Aceh pada November, dibandingkan Oktober yang tercatat hanya pada satu ZOM atau 6,25 persen.

"Jangan menunggu bencana terjadi untuk bertindak, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," tegas Taufik.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota bersama instansi terkait memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wakapolda Aceh Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026

Oleh Redaksi · 26 Okt, 15.55 WIB

BANDA ACEH, Banda Aceh — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Senin, 26 Oktober 2026. Apel tersebut ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya operasi kepolisian yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi Patuh Seulawah 2026 dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Aceh dengan melibatkan personel Polda Aceh serta Polres dan Polresta jajaran, didukung instansi terkait. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Aceh.

Dalam amanat Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Wakapolda, disampaikan bahwa lalu lintas memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan membutuhkan komitmen serta tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat.

Operasi Patuh Seulawah 2026 mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan di Provinsi Aceh." Pelaksanaannya mengedepankan langkah edukatif, preem-

tif, dan preventif, disertai penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian dalam operasi ini antara lain melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, serta berkendara melebihi batas kecepatan. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Kapolda Aceh juga menekankan agar seluruh personel yang terlibat melaksanakan tugas dengan penuh

tanggung jawab, disiplin, profesional, dan humanis. Personel diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar kesadaran untuk tertib berlalu lintas tumbuh dari pemahaman tentang pentingnya keselamatan, bukan semata-mata karena adanya penindakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Disorot Dugaan Nepotisme, Akhirnya Dua Anak Menhaj Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.10 WIB



BANDA ACEH - Dua anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mundur dari jabatan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini diambil setelah pengangkatan keduanya menuai kritik publik dan dikaitkan dengan dugaan nepotisme.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, surat pengunduran diri keduanya telah diterima oleh pimpinan kementerian pada Senin (26/10/2026).

"Saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua

orang yang disebut di berita... beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri," ujar Dahnil di kantornya, Jakarta Pusat.

Pengangkatan Barbarossa dan Gibran sebelumnya menjadi sorotan karena keduanya merupakan anak kandung Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan. Sejumlah warganet mempertanyakan pengangkatan tersebut dan mengaitkannya dengan praktik nepotisme.

Dahnil menyebut keputusan mundur itu diambil untuk menjaga integritas kementerian sekaligus merespons kegaduhan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah harus terbebas dari praktik yang melanggar etika.

"Itu juga untuk menjawab komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap harus terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya," tegasnya.

Dahnil juga menjelaskan latar belakang keterlibatan kedua anak Menhaj. Menurut dia, keduanya mulai membantu ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dibentuk pada akhir Oktober 2024. Saat itu, lembaga tersebut masih kekurangan sumber daya manusia dan belum memiliki struktur organisasi, kantor,

maupun staf administrasi yang memadai.

"Keramaian kemarin terkait dengan dua tenaga ahli ini sebenarnya memang berangkat dari kebutuhan Kementerian Haji di awal-awal dulu. Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela," ungkap Dahnil.

"Akhirnya salah duanya itu adalah anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal, karena saya juga enggak ada yang membantu. Karena Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu mereka enggak bergaji," sambungnya.

NASIONAL

Kematian Letda Inf. Jihad di Sukoharjo Akibat Ledakan Senjata, Bukan Penembakan

Oleh Redaksi · 27 Okt, 08.57 WIB



BANDA ACEH -Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memastikan penyebab meninggalnya Letda Infanteri Jihad Ahmad Al-Rasyid di Markas Grup 2 Kopassus, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus Kolonel Infanteri Indra Mardianto menjelaskan, peristiwa ini murni disebabkan oleh ledakan senjata api (senpi) jenis pistol di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus.

"Kejadiannya pada hari Sabtu, 24 Oktober

Indra juga menepis informasi yang beredar di luar yang menyebutkan bahwa Letda Jihad meninggal dunia akibat ditembak oleh sesama prajurit TNI.

"Mengetahui kejadian tersebut, memang ada korban meninggal dunia, namun kronologinya tidak seperti yang disebutkan dalam

berita bahwa korban tewas ditembak," jelas Indra.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, lanjut Indra, ledakan pistol tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidak-sengajaan. Meski demikian, ia belum merinci kronologi lengkapnya dan memastikan bahwa fakta-fakta tersebut akan diungkap.

"Itu kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak, murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan. Semuanya terekam di CCTV," imbuhnya.

Nantinya, rekaman CCTV tersebut akan menjadi alat bukti yang kuat selama proses hukum yang kini ditangani oleh polisimiliter.

"Kasusnya akan dilimpahkan ke Denpom (Detasemen Polisi Militer) untuk proses penyidikan lebih lanjut," pungkas Indra.

INTERNASIONAL

Tiga Garis Kolonial: Akar Sengketa Berkepanjangan Tiongkok-India di 'Tibet Selatan'

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.35 WIB



Perbatasan Tiongkok-India memiliki panjang total hampir 2.000 kilometer, dengan luas keseluruhan lebih dari 120.000 kilometer persegi, yang terutama mencakup sengketa wilayah di tiga wilayah, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis perbatasan tidak membentang secara datar, melainkan mengikuti punggung pegunungan; umumnya Tiongkok berada di dataran tinggi yang lebih tinggi, sedangkan India berada di dataran rendah yang lebih rendah. Secara historis, Dinasti Qing, Pemerintahan Beiyang, Pemerintahan Nasional, serta pemerintahan Partai Komunis Tiongkok yang kemudian berkuasa, tidak mengakui perbatasan yang ditetapkan secara sepihak pada masa kolonial Inggris. Pada masa itu, para surveyor Inggris terutama menggunakan metode triangulasi untuk menetapkan perbatasan di antara puncak-puncak pegunungan, sehingga menghasilkan tiga garis pembatas utama: Garis John-nson (Johnson Line), Garis Macar-tney (Macartney Line), dan Garis McMahon (McMahon Line).

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Inggris—berdasarkan pertimbangan geopolitik militer seperti untuk mengantisipasi ancaman Rusia dan menjamin keamanan India—mengajukan klaim perbatasan berikut di bagian barat: Garis Johnson (Johnson Line, 1865): Johnson, seorang pejabat Badan Survei India, menyusup ke perbatasan selatan untuk melakukan pemetaan, dan secara rahasia memasukkan wilayah Aksai Chin serta wilayah luas di utara Pegunungan Karakoram ke dalam wilayah Kashmir Britania.

Garis Ardagh-Johnson (Ardagh-Johnson Line, 1897): Diajukan oleh Ardagh Johnson, Kepala Bagian Intelijen Markas ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Pangdam IM Lantik Bintara TNI AD, Tekankan Disiplin dan Jiwa Keprajurititan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.52 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., menutup Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang III Tahun Anggaran 2026 di Rindam Iskandar Muda, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin dan jiwa keprajurititan bagi para Bintara yang baru dilantik.

Penutupan pendidikan itu menandai keberhasilan para prajurit siswa menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dan resmi dilantik serta disumpah menjadi Bintara TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Mereka selanjutnya akan mengemban tugas dan

tanggung jawab sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara.

Dalam amanatnya, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat, serta pengorbanan selama mengikuti pendidikan.

Menurut Pangdam, pendidikan yang telah ditempuh merupakan proses pembentukan karakter untuk mengubah sikap dan perilaku sipil menjadi prajurit TNI AD yang tangguh, berkarakter, serta memiliki jiwa nasionalisme dan militansi yang kuat, dengan senantiasa berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan dasar bukanlah akhir dari proses pembentukan seorang prajurit, melainkan awal perjalanan pengabdian yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan moral dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Pangdam kemudian menyampaikannya lima penekanan yang harus menjadi pedoman bagi seluruh Bintara yang baru dilantik.

Pertama, memelihara dan meningkatkan kedisiplinan dalam sikap maupun perilaku yang telah terbentuk selama pendidikan agar menjadi bagian dari kepribadian sehari-hari sebagai prajurit.

Kedua, tidak cepat berpuas diri atas pencapaian yang telah diraih serta senantiasa mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara

prima untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

Ketiga, berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Para prajurit juga diminta menaati hukum, menjunjung tinggi etika pergaulan, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik TNI AD.

Keempat, mengutamakan faktor keamanan, baik personel maupun materiil, dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan tugas.

Kelima, senantiasa berdo'a sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

3 BERITA

ACEH

Titik Nol Kreativitas USK: Di Bawah Rindang Pohon Panggung Tanpa Nama, Antara Jejak Ulama dan Asa Mahasiswa

Oleh Syarifudin Brutu · 27 Okt, 20.04 WIB



Tanyakan kepada siapa saja di Universitas Syiah Kuala (USK) tentang tempat nongkrong atau lokasi latihan paling legendaris, dan jawabannya sering kali keluar begitu saja tanpa perlu pikir panjang: "Belakang AAC aja." Tidak ada pin peta digital yang diperlukan. Tidak ada instruksi rumit yang harus dijelaskan.

Letaknya sangat strategis namun bersahaja. Persis diapit oleh gedung AAC Dayan Dawod, kantin utama, deretan ATM, BSI KCP USK, hingga USK store. Siang hari, area berpagar rapi ini berfungsi ganda sebagai tempat berteduh sekaligus kantin terbuka. Mahasiswa lalu-lalang menyantap makan siang di bawah teriknya matahari Banda Aceh, sementara angin menyapu dedaunan rindang.

Namun, begitu jarum jam menunjuk pukul empat sore, suasana bergeser total.

Meja-meja makan berangsur kosong. Panggung terbuka di tengah naungan pohon besar itu mendadak hidup. Dari ruang publik biasa, tempat ini berubah menjadi panggung kreatif tanpa nama—jantung tersembunyi tempat denyut seni mahasiswa USK berdetak dari masa ke masa.

Ada pemandangan kontras yang justru menghidupkan tempat ini. Tepat di bawah naungan ranting-ranting pohon besar tersebut, berdiri sebuah kompleks makam kecil berpagar. Sebuah prasasti mencatat dengan jelas kalimat penuh sejarah: "Di tempat ini disemayamkan para ulama yang

menyebarkan Islam di Aceh Besar."

Tertulis lima nama ulama sepuh yang bersemayam di sana: H. Achmad Qasturi (1316–1389), Tgk. Malem Panyang (1337–1339), Datok Nafi, Muda Selangor, dan Abu Said. Di sinilah letak magisnya. Hanya berjarak beberapa meter dari pusara para penyebar agama masa lampau, energi muda kreativitas modern bergolak tanpa henti setiap harinya.

Begitu petang menjelang, pelataran ini riuh oleh berbagai aktivitas seni. Mahasiswa lintas program studi berkumpul melebur tanpa sekat. Ada yang berlatih teater, menghafal naskah drama, merangkai gerak tari tradisional maupun kontemporer, membaca puisi

dengan intonasi tajam, hingga menabuh ritme Rapa'i yang mengema.

Ketika musim pementasan atau festival besar kampus semakin dekat, kapasitas tempat ini diuji. Panggung utama langsung penuh sesak. Para peserta latihan tumpah ruah hingga ke teras samping Kantin AAC dan sudut-sudut gang gedung. Setiap jengkal ruang di sekitar pohon tersebut berubah menjadi zona gladi resik.

Dulu, cerita tentang tempat ini punya babak malam yang panjang. Para alumni senior kerap menge-nang bagaimana mereka berlatih di bawah panggung tanpa nama ini hingga larut malam—bahkan melewati ...

ACEH

Stafsus Gubernur Aceh Nektu Bahas Progres Pemulihan Lahan Pertanian dengan Plt Kadistanbun

Oleh Redaksi · 27 Okt, 19.35 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh – Staf Khusus Gubernur Aceh, Junaidi (Nektu), bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, Senin (26/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Nektu menyampaikan sejumlah masukan dari petani terkait pemulihan sawah dan kebun yang dinilai masih perlu dipercepat.

Nektu hadir mendampingi kelompok tani dari Subulussalam. Ia menekankan pentingnya mempercepat pekerjaan di lapangan sebelum intensitas hujan meningkat dan waktu pelaksanaan semakin terbatas menjelang akhir tahun.

"Masih ada sawah yang belum tertangani maksimal, terutama yang rusak berat. Jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung juga perlu perhatian. Dari sisi perkebunan, komoditas kelapa sawit, kakao, kopi, pinang, dan lainnya masih memerlukan dukungan," kata Nektu.

Ia meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar upaya percepatan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Menanggapi masukan tersebut, Azanuddin Kurnia menyatakan pihaknya akan terus memacu pelaksanaan program sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada.

"Kami berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan sisa waktu sekitar dua bulan ini," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas perkebunan yang terdampak bencana mencapai 60.438 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.968 hektare masuk dalam fasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaannya masih berlangsung, mulai dari pendataan calon petani dan calon lokasi (CPCL), pembibitan, hingga penyaluran bantuan. Adapun rincian luas perkebunan yang masuk dalam fasilitasi tersebut meliputi:

- Kopi seluas 30.189 hektare di lima kabupaten.
- Kakao seluas 9.054 hektare di 10 kabupaten.
- Kelapa seluas 1.230 hektare di tujuh kabupaten.
- Karet seluas 495 hektare di dua kabupaten.

Sementara itu, pemulihan 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang terus berjalan. Program tersebut dibagi dalam dua tahap, yakni tahap I seluas 28.211 hektare dan tahap II seluas 12.641 hektare.

Hingga 26 Oktober 2026, serapan anggaran untuk pemulihan sawah di Aceh telah mencapai 62,1 persen.

Selain pemulihan lahan, program pembangunan infrastruktur pendukung pertanian mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 unit bangunan konservasi, 300 unit jaringan irigasi tersier, dan 106 unit jalan usaha tani. Capaian pelaksanaan setiap kegiatan tersebut berbeda-beda.

Untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, Azanuddin mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan dukungan fasilitasi dari Kementerian Pertanian pada 2027. ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wagub Aceh Hadiri Maulid Nabi dan Doa Bersama Mengenang Setahun Bencana di Gayo

Oleh Redaksi · 26 Okt, 16.49 WIB

BANDA ACEH, Aceh TENGAH — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhilullah, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan masyarakat serta mengenang satu tahun bencana banjir dan longsor yang melanda dataran tinggi Gayo.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Masjid Quba, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/10/2026).

Fadhilullah, yang akrab disapa Dek Fadh, hadir didampingi Direktur Intelkam Polda Aceh dan

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Turut hadir Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Aceh Tengah, jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat keimanan, mempercepat ukhuwah Islamiyah, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, doa bersama digelar sebagai ikhtiar spiritual

untuk memohon perlindungan Allah SWT, keselamatan bagi masyarakat Aceh, serta kekuatan bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di dataran tinggi Gayo.

Dalam sambutannya, Fadhilullah mengatakan peringatan Maulid Nabi dan doa bersama memiliki makna penting untuk memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat masyarakat dalam menghadapi berbagai ujian dan musibah.

"Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita memperkuat keimanan, men-

jaga persatuan, dan terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kita juga berdoa agar Allah SWT senantiasa melindungi masyarakat Aceh, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, serta menjauhkan daerah kita dari segala musibah," ujar Dek Fadh.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan satu tahun bencana banjir dan longsor di dataran tinggi Gayo sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar, Antrean di SPBU Mulai Menghilang

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.46 WIB

BANDA ACEH, Banda Aceh – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam menindak para pelaku penimbunan bahan

bakar minyak (BBM) jenis solar di Aceh.

Menurut Dek Gam, langkah penegakan hukum tersebut patut diapresiasi karena berdampak terhadap kelancaran masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



BBPOM Aceh Dorong Layanan MPP Aceh Besar yang Responsif dan Berkualitas

Kronologi Tragis Atlet Selam Syabilla Rizkia, Sempat Melambaikan Tangan 200 Meter dari Finis

Agis Atlet Selam Syabilla at Melambaikan Tangan ri Finis

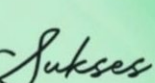
m Syabilla
n Tangan

Kronologi Atlet Selam Syabilla Rizkia Meninggal di Porprov Jateng, Sempat Lambaikan Tangan 2 Kali





Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

ANEKA BERITA

5 BERITA

ISLAM

Fasilitas Mewah di Lapas Bukan Hanya Masalah Perizinan

Oleh Ria Nurvika · 27 Okt, 15.00 WIB



Ilustrasi realistik fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Bogor, yang menyoroti persoalan pengawasan, perizinan aset negara, dugaan transaksi ilegal, dan sistem sanksi bagi narapidana. FOTO/AI for HAI.

Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

MBUSMAN RI menemukan bangunan dengan fasilitas mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas II A Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9).

Syafrida Rachmawati Rasahan menyampaikan bahwa rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran.

Lebih fantastis lagi di dalam ruangan tersebut ditemukan minuman keras.

Fasilitas mewah ini dapat ditempati oleh warga binaan dengan mengeluarkan sejumlah uang.

Lebih jauh lagi ditemukan kawasan rumah mewah tersebut tidak memiliki pagar permanen.

Kawasan tersebut ternyata terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumput bambu di sekitarnya. Ini menjadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) atas desakan dari Komisi XIII DPR RI, dengan tujuan menjamin perlakuan yang sama (tidak diskriminasi) bagi seluruh warga binaan telah membongkar tiga rumah hunian di kompleks Lapas Kelas IIA, Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor pada Rabu, 30 September 2026 lalu.

Pembongkaran tersebut dilakukan dengan menggunakan ekskavator besar.

Masalah Perizinan

Penemuan hunian dan fasilitas mewah di Lapas Cibinong menda-

pat sorotan dari beberapa pakar hukum. Pakar Hukum Administrasi Negara UGM, Oce Madril, mengatakan bahwa penggunaan lahan milik pemerintah oleh institusi lain pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengikuti ketentuan pemanfaatan aset.

Oce juga menilai bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset pemerintah daerah sekaligus persoalan kepatuhan terhadap tata kelola perizinan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dilibatkan karena dilihat adanya transaksi keuangan dalam penyediaan fasilitas mewah tersebut serta profil kekayaan pihak-pihak yang berkaitan hingga ditemukan adanya kemungkinan Tindak Pencucian Uang (TPPU).

Kasus fasilitas mewah dalam lapas bukan fenomena baru dalam hal adanya transaksi bagi narapidana. Kasus serupa sebelumnya terjadi dalam kasus Sukamiskin.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai bahwa temuan kasus yang sama pada lapas Cibinong memperlihatkan kemungkinan berkembangnya pola lama tersebut dalam bentuk berbeda.

Oleh karena itu, apabila fasilitas tersebut memang disewakan kepada narapidana, maka persoalannya bukan lagi sebatas administrasi aset.

Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

INTERNASIONAL

Detik-detik Pangeran Arab Tiba di Iran Minta Bantuan Atas Serangan Houthi

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.36 WIB



BANDA ACEH -Terekam detik-detik Pangeran Arab yang juga Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman tiba di Teheran, Iran diduga untuk meminta bantuan atas serangan Houthi.

Ketibaan rombongan kerajaan Saudi di Teheran pada Senin (26/10/2026) diduga terkait diplomasi perang dengan pihak Houthi Yaman.

Sebab diketahui belakangan Houthi yang disebut bersekongkol dengan Iran rutin melakukan serangan ke Arab Saudi khususnya Ibu Kota Riyadh.

Arab Saudi pun sebelumnya sempat meminta Iran agar bisa menjembatani diplomasi dengan Houthi lantaran negara tersebut merupakan sekutu kelompok Houthi.

Dimuat The Jerusalem Post Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan antara negara-negara yang menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Arab Saudi, Turki, dan Pakistan) dan Iran.

Pembicaraan ini penting dan akan menguji perjanjian baru tersebut.

Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah adalah perjanjian perta-

hanan, yang sebagian dimodelkan berdasarkan NATO.

Namun, beberapa pihak mempertanyakan bagaimana perjanjian ini akan berfungsi.

Reuters menyebut pihak Arab Saudi mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk membuka saluran negosiasi guna "mencegah kembalinya eskalasi militer".

Menurut pejabat Saudi dan Iran, perwakilan dari Iran adalah Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman, adik dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman; Pakistan diwakili oleh kepala angkatan darat Marsekal Lapangan Asim Munir; dan Turki diwakili oleh kepala intelijen Ibrahim Kalin.

Media pemerintah Iran mempublikasikan foto-foto Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, dan Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, yang menghadiri pertemuan tersebut.

Pada kesimpulan pertemuan, keempat negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam bidang perdamaian dan keamanan, demikian dilaporkan media pemerintah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OTOMOTIF

Kia Buka Pemesanan Mobil Listrik Carens EV, Intip Bocoran Harga dan Spesifikasinya

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.06 WIB



BANDA ACEH - Setelah memperlihatkan model konsep, Kia akhirnya mulai membuka pemesanan atau pre-book mobil listrik terbarunya, All Carens EV di Indonesia. Berdasarkan bocoran, mobil listrik model multi purpose vehicle (MPV) ini ditawarkan dengan estimasi harga Rp382 juta hingga Rp432 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sebelumnya, Kia memamerkan model konsep Carens EV di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Lalu, seperti apa spesifikasi mobil listrik ini?

Kia menyebutkan Carens EV memiliki pilihan baterai Standard dan Long Range, serta konfigurasi enam atau tujuh tempat duduk. Kombinasi tersebut memungkinkan

konsumen menyesuaikan pilihan kendaraan dengan kebutuhan mobilitas keluarga.

Dari sisi desain, Carens EV mengusung tampilan Digital Tiger Face di bagian depan. Karakter tersebut diperkuat Star Map LED Connected DRLs dengan lampu sein terintegrasi, Star Map LED Connected Tail Lamps, serta pelek crystal-cut dual-tone aero alloy wheels.

Di bagian interior, Kia membekali Carens EV dengan Dual Panoramic Display berukuran 26,6 inci, Dual Pane Panoramic Sunroof, pencahayaan ambient dengan 64 pilihan warna, serta sistem audio Bose delapan speaker. Untuk menunjang kenyamanan, tersedia ventilated seat di bagian depan dan

Smart Pure Air Purifier with AQI Display.

Mobil listrik ini juga dilengkapi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Level 2 dengan 20 fitur bantuan berkendara dan keselamatan. Selain itu, terdapat paddle shifter untuk mengatur pengereman regeneratif, serta fitur i-Pedal yang membantu pengemudi mengendalikan akselerasi dan perlambatan melalui satu pedal.

Fitur Vehicle-to-Load (V2L) di bagian interior dan eksterior memungkinkan baterai kendaraan memasok daya listrik ke perangkat yang kompatibel.

Kia mengungkapkan ada empat varian Carens EV untuk pasar Indonesia, yakni Carens EV Earth Captain Long Range, Earth 7s

Long Range, Air Captain Standard, dan Air 7s Standard. Keempat varian tersebut menggabungkan pilihan baterai dan konfigurasi tempat duduk yang berbeda.

VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho mengatakan, konsumen dapat memilih varian sesuai kebutuhan perjalanan dan kapasitas penumpang.

"Kami memiliki pilihan Standard dan Long Range, masing-masing dengan konfigurasi enam atau tujuh tempat duduk. Jadi, konsumen bisa mempertimbangkan kebutuhan perjalanan sekaligus susunan kursi yang paling sesuai untuk keluarganya," ujar Welly, dalam keterangannya, belum lama ini.

SPORT

Turnamen DEGE 2026 Bergulir, PS Unaya Tantang Pordela di Laga Pembuka Sore Ini

Oleh Redaksi · 27 Okt, 14.04 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — PS Unaya Kuta Baro akan menghadapi Pordela Pulo Aceh pada laga pembuka Turnamen Sepak Bola DEGE 2026 di Lapangan PSKB Kuta Breuh, Gampong Cot Preh Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Selasa sore, 27 Oktober 2026.

Turnamen ini diikuti 16 tim dari sejumlah daerah yang akan bersaing memperebutkan total hadiah Rp62 juta. Ajang tersebut diharapkan menjadi ruang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus mempererat hubungan antartim.

Owner DEGE, Nasri Dege, mengatakan seluruh tim peserta telah menyatakan kesiapan mengikuti turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi berlangsung lancar dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

"Semoga seluruh pertandingan berlangsung lancar, sportif, dan mampu menjadi hiburan bagi masyarakat," ujar Nasri, Senin, 26 Oktober 2026.

Sebanyak 16 tim yang ambil bagian dalam turnamen ini adalah PS Unaya Kuta Baro, PSKD Kajhu, Persima Meunasah Krueng, Pordela Pulo Aceh, Lam-

seunong FC, Carlos Lhoknga, Lhokdawoeut FC Lamteuba, dan Andela Lambro Deyah Kuta Baro.

Delapan tim lainnya yakni Puspa Payong Baet Baitussalam, Sinar Sukma 80 Sibreh, PSMT Meunasah Tuha, PSPI Indrapuri, Krueng Raya FC, Persimal Mahayati Krueng Raya, Rungkhoem FC Lam Alu Cut Kuta Baro, dan Amla Academy.

Turnamen DEGE 2026 dijadwalkan dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mucthi. Ketua panitia, Fajar, mengajak seluruh tim menjaga sportivitas dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan selama kompetisi berlangsung.

"Melalui turnamen ini kami berharap silaturahmi antartim semakin erat sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses," kata Fajar.

Pertandingan pembuka antara PS Unaya Kuta Baro dan Pordela Pulo Aceh menjadi awal dari rangkaian kompetisi yang mempertemukan 16 tim dalam perebutan gelar juara Turnamen DEGE 2026.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Siapa yang Bisa Mematahkan Dominasi T1 di League of Legends?

Oleh Redaksi · 27 Okt, 02.00 WIB



Siapa yang Bisa Mematahkan Dominasi T1 di League of Legends. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Dalam dunia esports, era adalah periode domi-
nasi yang relatif panjang oleh satu
tim. Hampir setiap game pernah
mengalami hal ini, dengan tim-tim
berbeda yang menduduki puncak.
Namun, dalam League of
Legends, meskipun telah terjadi
beberapa era, hanya ada satu tim
yang mendominasi. Dalam artikel
ini dari para ahli di 1xBet Indone-
sia, Anda akan mengetahui apa
yang membuat pola ini unik.

Era-era penting dalam esports

Di Dota 2, periode 2011 hingga
2013 sangat menonjol: Natus Vin-
cere berhasil mencapai grand final
The International selama tiga
tahun berturut-turut, dengan sekali
menjadi juara dan dua kali men-
jadi runner-up.

Namun, periode 2018–2019
tidak bisa disebut sebagai era OG:
meskipun berhasil mengangkat
Aegis of Champions dalam dua
tahun berturut-turut, mereka tidak
memenangkan turnamen lain apa
pun.
Team Spirit, juara dunia tiga
kali, memegang rekor gelar terba-
nyak di The International, tetapi
mereka bergantian mengalami
musim yang luar biasa dan masa-
masa sulit, serta belum mampu
membangun era mereka sendiri.
Secara keseluruhan, tahun 2023
dapat dengan aman disebut seba-
gai tahun Gaimin Gladiators, dan
tahun 2024 menjadi milik Team
Falcons, dengan masing-masing
meraih enam gelar dalam kampa-
nye mereka. Namun, satu musim

saja hampir tidak cukup untuk
disebut sebagai sebuah era.
Counter-Strike menawarkan
contoh-contoh yang lebih jelas.
Ninjas in Pyjamas mendominasi
pada 2012–2013, memenangkan
87 peta berturut-turut di LAN;
Fnatic memimpin pada
2014–2015, dengan olofmeister
yang legendaris kini masuk ke
dalam HLTV Hall of Fame.
Astralis menetapkan standar
pada 2018–2019, merebut tiga
Major berturut-turut sehingga total
gelar mereka menjadi empat.
Pada musim 2021–2022, NAVI
menjadi tim yang harus dikalah-
kan dengan s1mple di puncak per-
formanya, memenangkan PGL
Major Stockholm 2021 tanpa
kehilangan satu peta pun dalam
enam pertandingan.

Vitality telah muncul sebagai
kekuatan dominan di CS:GO dan
CS2, dengan tiga gelar Major
sejak 2023. Namun, era organisasi
asal Prancis ini mulai meredup di
bawah tekanan dari Spirit.
Lanskap League of Legends
Di League of Legends, ada
T1—dengan pemain bintang
Faker—dan tim-tim lainnya: itulah
cara paling sederhana untuk meng-
gambarkan dunia kompetisi game
ini.
Sejak 2011, Riot Games telah
menggelar 15 Kejuaraan Dunia.
T1 telah memenangkan enam
gelar dan finis sebagai runner-up
dua kali, berhasil mencapai final
di lebih dari separuh ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	